



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

LAPORAN MONITORING

CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2025

DIREKTORAT
PRASARANA PERKERETAAPIAN



ditpraska



djka.dephub.go.id/prasaranaka



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah - Nya sehingga Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Direktorat Prasarana Perkeretaapian ini dapat selesai.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini merupakan laporan secara berkala/triwulan atas pelaksanaan Target Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025 dilaksanakan dengan tujuan untuk memantau kemajuan pelaksanaan/progres kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian per triwulan serta mengidentifikasi kendala/hambatan dan mencari penyelesaian serta upaya percepatan guna mencapai target yang ditetapkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025.

Jakarta, April 2024

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

Ir. HENGKI ANGKASSAWAN

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 196701081993031001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Direktorat Prasarana Perkeretaapian bertanggung jawab untuk mengelola, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan transportasi perkeretaapian di bidang prasarana perkeretaapian dengan kualitas dan kinerja instansi pemerintah yang baik, termasuk didalamnya aspek pertanggungjawaban (*Accountability*) pelaksanaan tugas Pemerintah baik secara administratif maupun secara manajerial kepemimpinan, sebagaimana diatur dalam kebijakan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka memenuhi peraturan-peraturan terkait tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan untuk dapat mengetahui capaian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tersebut, maka dilaksanakan monitoring capaian kinerja triwulanan pada Tahun 2025.

Monitoring capaian kinerja di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan antara lain :

- a. Memantau kemajuan pelaksanaan/progres indikator kinerja di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian per triwulan;
- b. Mengidentifikasi kendala/hambatan dalam pencapaian target indikator kinerja per triwulan dan mencari penyelesaian serta upaya percepatan guna mencapai target yang telah ditetapkan.



I.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sesuai tugas Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan. Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan dipimpin oleh Direktur Prasarana Perkeretaapian.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan



- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Direktorat Prasarana Perkeretaapian dibawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi terdiri dari :

1. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah 1 yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan



- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

2. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan



- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

3. Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultansi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultansi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultansi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultansi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian,



perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultansi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api.

4. Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api.

5. Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan



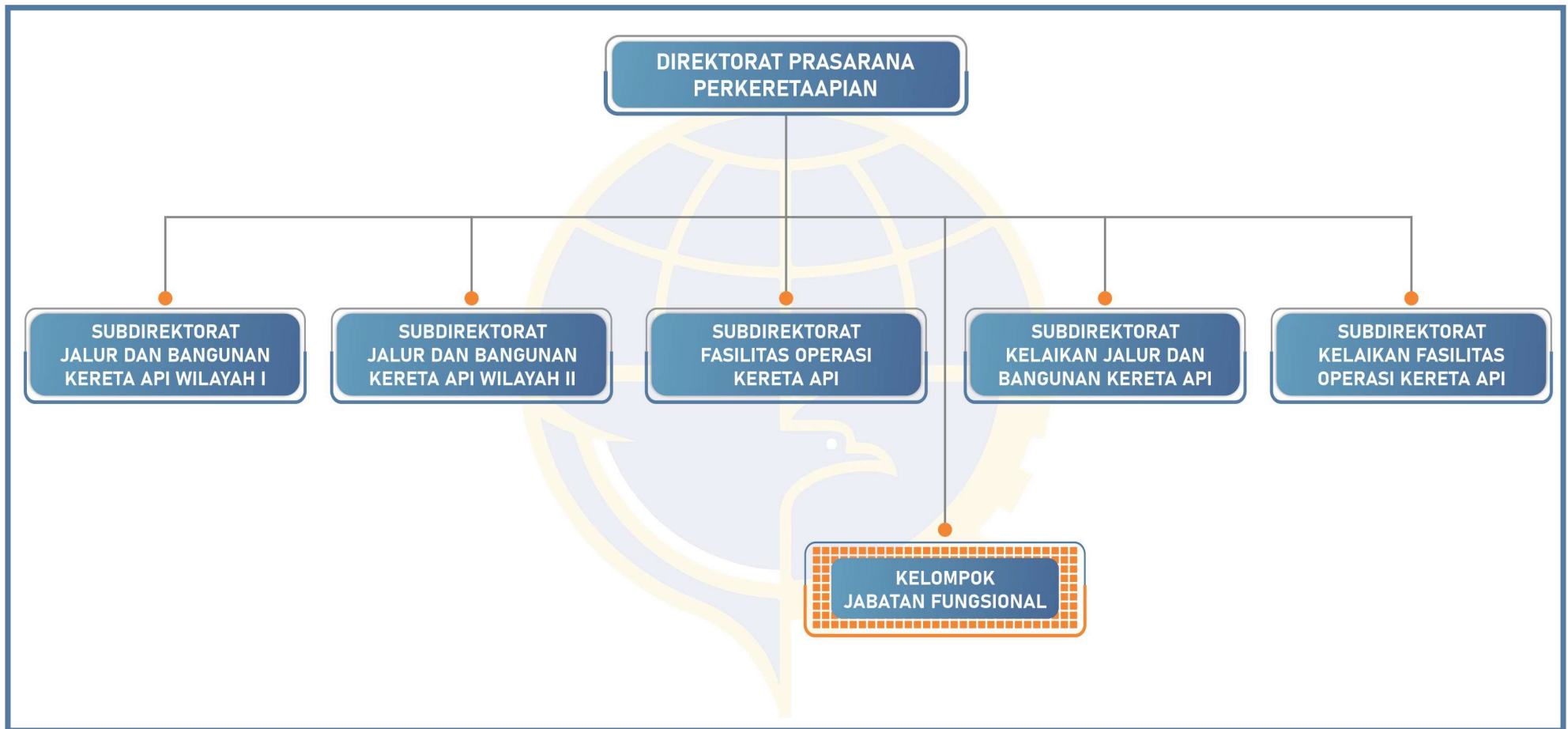
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api; dan
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

I.3 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan penetapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian dibentuk Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang terdiri dari jabatan tinggi pratama (Eselon 2) dan terdapat 5 jabatan administrator (Eselon 3) serta kelompok jabatan fungsional. Selain itu sesuai dengan kebijakan recofusing organisasi yaitu penghapusan jabatan struktural jabatan pengawas (Eselon 4) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang penunjukan koordinator kelompok, telah terdapat 10 pegawai yang ditunjuk sebagai koordinator tim di Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Gambaran secara jelas Struktur Organisasi sebagaimana digambarkan pada gambar dibawah ini :



Gambar I. 1
Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian



STRUKTUR ORGANISASI



DIREKTORAT
PRASARANA
PERKERETAAPIAN



Gambar I. 2
Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian



I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara keseluruhan Tahun 2025 berjumlah sebanyak 252 orang dengan rincian sebagai berikut :

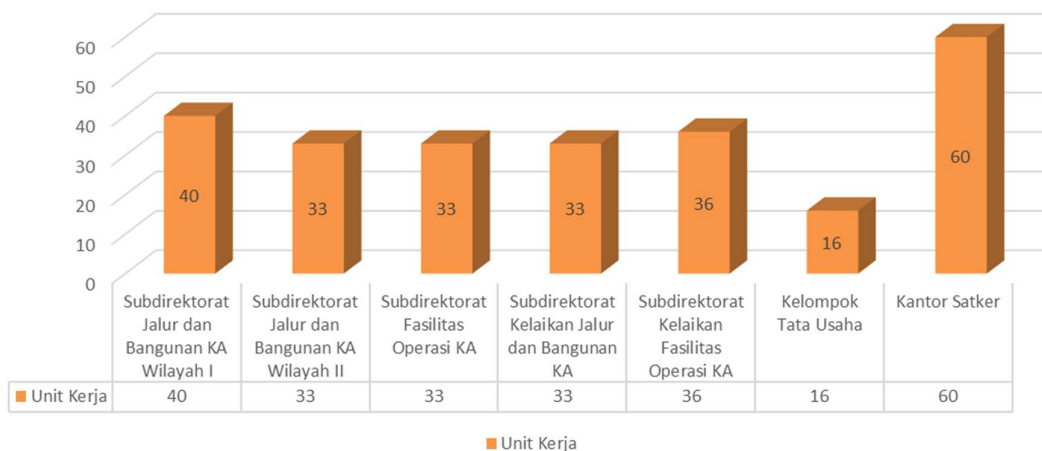
- 1) Jumlah SDM berdasarkan unit kerja pada masing – masing Sub Direktorat di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, terbagi atas :

Tabel I. 1

Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Unit Kerja

Sub Direktorat		Jumlah
Direktur Prasarana Perkeretaapian		1
Subdit I	Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	40
Subdit II	Jalur dan Bangunan KA Wilayah II	33
Subdit III	Fasilitas Operasi Kereta Api	33
Subdit IV	Kelaikan Jalur & Bangunan Kereta Api	33
Subdit V	Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api	36
Kelompok Tata Usaha		16
Kantor Satker		60
Total		252

PEGAWAI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN BERDASARKAN UNIT KERJA



Gambar I. 3

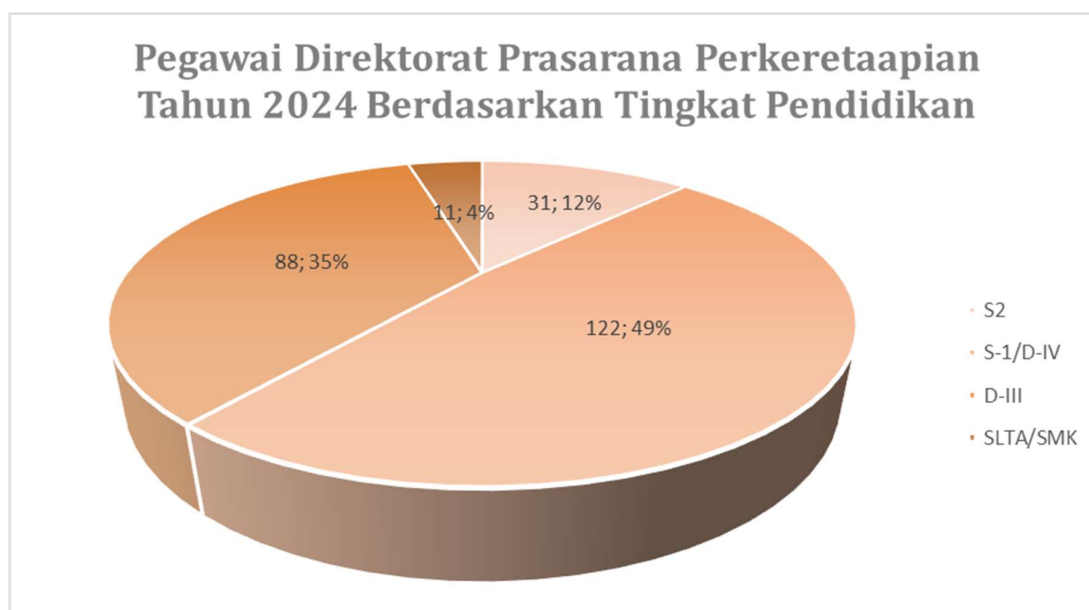
Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025 Berdasarkan Unit Kerja



- 2) Jumlah SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, terbagi atas :

Tabel I. 2
Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode Triwulan I Tahun 2025
berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
a.	S- 2	31
b.	S- 1/D-IV	122
c.	D- III	82
d.	SLTA/ SMK	17
TOTAL		252



Gambar I. 4
Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



- 3) Jumlah SDM berdasarkan Golongan/Kepangkatan di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, terbagi atas:

Tabel I. 3
Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode Triwulan I Tahun 2025
berdasarkan Golongan/Kepangkatan

No.	Golongan / Kepangkatan	Jumlah (orang)
a.	Golongan IV	11
b.	Golongan III	84
c.	Golongan II	58
d.	Golongan PPPK	22
e.	PPNPN	77
TOTAL		252



Gambar I. 5
Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025
Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Direktorat Prasarana Perkeretaapian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh unit Satuan Kerja yang dikepalai oleh Kuasa Pengguna Anggaran (*ex-officio*) selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian memiliki jumlah sumber daya Manusia pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) sebanyak 77 orang yang terbagi dalam Sekretariat Satuan Kerja dan 8 (delapan) kantor kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian.



I.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

A. Perjanjian Kinerja

Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah menetapkan rencana kinerja sebagaimana ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025, penetapan kinerja sebagai tolok ukur untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan supervisi akuntabilitas dan transparansi kinerja aparatur agar kinerja dapat dicapai dengan baik atau masih *on the right track*. Penetapan Target Kinerja tahun 2025 per sasaran dan indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel I.4

Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target
1	Peningkatan Konektivitas jaringan prasarana perkeretaapian dengan aksesibilitas tinggi	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana	%	64,540
2	Peningkatan Kinerja Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur Ka Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I Dan II	%	95,020
			Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	%	65,270
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,890
3	Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,340
			Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	90,480
4	Peningkatan Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Perkeretaapian	Peningkatan Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,200
			Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	15,000
			Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,760
			Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,000
			Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	79,000

Sebagai acuan pelaksanaan kinerja telah ditetapkan Rencana Aksi Atas Perjanjian kinerja Tahun 2025, Rencana Aksi kinerja per triwulan sebagaimana dijelaskan didalam tabel berikut :



Tabel I.5
Target Perjanjian Kinerja Per Triwulan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TARGET KINERJA TRIWULAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana	%	64,540	61,430	61.430	63.570	64.540
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur Ka Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I Dan II	%	95,020	95,020	95,020	95.020	95.020
		Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	%	65,270	64,430	64,430	64.430	65.270
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,890	3,870	3,870	3.870	3.890
3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,340	47,670	47,670	47.670	50.340
		Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	90,480	86,900	86,900	86.900	90.480
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,200	-	-	-	83,200
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	15,000	-	-	-	15,000
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,760	45,817	59.723	67.061	85.760
		Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,000	12,029	26,865	42.995	100.000
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	79,000	-	-	-	79.000



Dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2025 sebagaimana ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025, telah terdapat pengalokasian perencanaan anggaran yang mendukung kinerja sebagaimana didalam DIPA Awal Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar Rp. 508.529.636.000,- Dengan rincian Anggaran permasing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 6

Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025

No.	Sasaran	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Anggaran PK Awal 2025 (Rp.)
1.	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana	372.536.425.000
2.	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	Persentase Pengoperasian Jalur Ka Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I Dan II	3.017.854.000
		Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	94.164.676.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-
3.	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	4.528.574.000
		Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	1.953.638.000
4.	Meningkatnya KUALITAS Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	970.144.000
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	230.000.000



No.	Sasaran	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Anggaran PK Awal 2025 (Rp.)
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	31.128.325.000
		Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-
TOTAL			508.529.636.000



Selain itu untuk perencanaan kinerja yang telah memenuhi standar yang baik, didalam dokumen perjanjian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara jelas terdapat ukuran kinerja yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Result-focused, Time bond), untuk analisis SMART indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel I. 7
Analisis SMART Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Prasarana	Pengesahan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang prasarana yang mendukung Pengembangan dan konektivitas (DED, SID, dll) sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan perencanaan teknis pengembangan dan konektivitas bidang Prasarana Perkeretaapian s.d. tahun 2029 dengan formulasi sebagai berikut : $\text{Persentase Pemenuhan Perencanaan teknis} = \frac{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Prasarana s.d. Tahun 2024 dan jumlah Dokumen Perencanaan teknis bidang prasarana perkeretaapian 2025 s.d tahun 2029}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Eselon I (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dan sesuai dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029



Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	Jalur Kereta Api yang sesuai dengan Kategori 1 (Nyaman) Kecepatan 100 s.d 120 Km/jam dan Kategori II (Aman) Kecepatan 80 s,d 100 Km/jam	Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan, dengan formulasi sebagai berikut : $\text{Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Target RPJMN dan sesuai dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal	Fasilitas operasi kereta api (sistem persinyalan) dengan interlocking elektrik diwilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi	Jumlah unit Persinyalan fasilitas operasi yang dioperasikan berbasis elektrik s.d tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah unit persinyalan fasilitas operasi eksisting pada tahun berjalan sd tahun 2029, dengan formulasi sebagai berikut : $\text{Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal} = \frac{\text{Jumlah Unit Persinyalan Fasilitas Operasi yang berbasis Elektrik s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Unit Persinyalan Fasilitas Operasi berbasis elektrik dan mekanik Eksisting sd tahun berjalan dan rencana pembangunan Fasilitas Operasi Elektrik pada Tahun 2025 s.d. 2029}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Target RPJMN dan sesuai dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029



Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	publik yang diselenggarakan Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui Survey Aplikasi 3A IPK (Indeks Persepsi Korupsi) – IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4) <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik	minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																										
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																										
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																										
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																										
Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Prasarana Perkeretaapian (Jalur dan Bangunan KA serta Fasilitas Operasi) yang sudah disertifikasi/ memiliki sertifikat kelaikan	Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, bangunan, fasilitas operasi, sistem dan komponen) yang sudah tersertifikasi kelaikan dari tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian periode 2025-2029, dengan formulasi sebagai berikut : Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan = Jumlah Prasarana yang sudah Tersertifikasi Kelaikan s.d Tahun Berjalan Jumlah Kebutuhan Sertifikasi Kelaikan pada tahun berjalan dan rencana kebutuhan Sertifikasi Kelaikan s.d. 2029 x 100%	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029																									



Persentase Pemenuhan Kebutuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	NSPK yang telah ditetapkan/diusulkan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Jumlah NSPK yang telah ditetapkan/diusulkan oleh Direktorat PrasaranaKA, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang prasarana perkeretaapian sesuai amanah peraturan perundangan, dengan formulasi sebaagai berikut : $\text{Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan/diusulkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian s.d 2029}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Merupakan Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai skala 1-100)	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Berdasarkan Pemenpan RB No. 88 Tahun 2021	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029



Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Merupakan Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Penilaian Penerapan Manajemen Risiko Level 0-30 mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan <table><tr><th>No.</th><th>Total Skor Manajemen Risiko</th><th>Simpulan Level</th></tr><tr><td>1.</td><td>0 – 7</td><td><i>Initial</i></td></tr><tr><td>2.</td><td>8 – 14</td><td><i>Repeatable</i></td></tr><tr><td>3.</td><td>15 – 20</td><td><i>Defined</i></td></tr><tr><td>4.</td><td>21 – 25</td><td><i>Managed</i></td></tr><tr><td>5.</td><td>26 – 30</td><td><i>Optimised</i></td></tr></table>	No.	Total Skor Manajemen Risiko	Simpulan Level	1.	0 – 7	<i>Initial</i>	2.	8 – 14	<i>Repeatable</i>	3.	15 – 20	<i>Defined</i>	4.	21 – 25	<i>Managed</i>	5.	26 – 30	<i>Optimised</i>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
No.	Total Skor Manajemen Risiko	Simpulan Level																					
1.	0 – 7	<i>Initial</i>																					
2.	8 – 14	<i>Repeatable</i>																					
3.	15 – 20	<i>Defined</i>																					
4.	21 – 25	<i>Managed</i>																					
5.	26 – 30	<i>Optimised</i>																					
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (skala 0-100%) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (skala 0-100%) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi Monev Kemenkeu . Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik; • 80% - 90% : Kategori Baik; • 60% - 80% : Kategori Cukup; • 50% - 60% : Kategori Kurang; • Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia dan megacu kepada nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan pertahun s.d tahun 2029																		



Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang prasarana perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Buka Pajak Bidang Prasarana Perkeretaapian apda tahun berjalan	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian dibandingkan dengan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian $\text{Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PNBP}}{\text{Target PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada target rencana penyelesaian perizinan dan Sertifikasi dibidang prasarana perkeretaapian	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan pertahun s.d tahun 2029
---	--	--	--	--	---



Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Direktorat Prasarana Perkeretaapian (skala 0-100)	Rumusan Perhitungan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian diperoleh dari hasil penilaian dari Unit Kearsipan I Kementerian Perhubungan pada waktu berjalan (periode tahunan) berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI nomor 165 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan tata cara penilaian pengawasan kearsipan. <i>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal = Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis + Aspek Sumber Daya Kearsipan</i> <table><tr><th colspan="2">KETERANGAN KATEGORI</th></tr><tr><td>> 90 - 100</td><td>AA (SANGAT MEMUASKAN)</td></tr><tr><td>> 80 - 90</td><td>A (MEMUASKAN)</td></tr><tr><td>> 70 - 80</td><td>BB (SANGAT BAIK)</td></tr><tr><td>> 60 - 70</td><td>B (BAIK)</td></tr><tr><td>> 50 - 60</td><td>CC (CUKUP)</td></tr><tr><td>> 30 - 50</td><td>C (KURANG)</td></tr><tr><td>> 0 -30</td><td>D (SANGAT KURANG)</td></tr></table>	KETERANGAN KATEGORI		> 90 - 100	AA (SANGAT MEMUASKAN)	> 80 - 90	A (MEMUASKAN)	> 70 - 80	BB (SANGAT BAIK)	> 60 - 70	B (BAIK)	> 50 - 60	CC (CUKUP)	> 30 - 50	C (KURANG)	> 0 -30	D (SANGAT KURANG)	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya nilai pengaawasan kearsipan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan pertahun s.d tahun 2029
KETERANGAN KATEGORI																					
> 90 - 100	AA (SANGAT MEMUASKAN)																				
> 80 - 90	A (MEMUASKAN)																				
> 70 - 80	BB (SANGAT BAIK)																				
> 60 - 70	B (BAIK)																				
> 50 - 60	CC (CUKUP)																				
> 30 - 50	C (KURANG)																				
> 0 -30	D (SANGAT KURANG)																				



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN



BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara berkesinambungan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala yang dimulai dari pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja dan penilaian kinerja secara periodik melalui monitoring dan evaluasi kinerja periode bulanan sesuai kebijakan Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui Nota Dinas : 0080/K3/I/2025 perihal Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Bulanan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan monitoring kinerja periode triwulan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Nomor : HUB-12.05.CFM.02.SOP.01.03 (Direktorat Prasarana Perkeretaapian) tentang Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Periode Triwulanan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, monitoring dan evaluasi kinerja tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana pada Tahun 2025, salah satu penggunaan instrumen pengukuran dan pengelolaan kinerja secara elektronik menggunakan sistem aplikasi *E – Performance* dan aplikasi Sistem Pelaporan Kinerja (SILAKI) Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta monitoring rencana aksi atas perjanjian kinerja sesuai dengan PM 85 Tahun 2020.

II.1. TAHAP PENGUKURAN KINERJA

Dalam dokumen Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja secara triwulanan sesuai indikator kinerja kegiatan yang tertuang didalam Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025.

Pengukuran pencapaian kinerja pada laporan kinerja instansi pemerintah ini menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan cara perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi pertama, apabila output suatu kegiatan **tidak tercapai sesuai dengan target**, formula yang dipergunakan adalah :

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



2. Kondisi kedua, apabila output suatu kegiatan **tercapai sesuai dengan target tetapi biaya yang digunakan lebih rendah dari rencana anggaran**, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja adalah :

1. Perhitungan Capaian Kinerja sesuai dengan formulasi perhitungan penetapan indikator kinerja tahun 2025;
2. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 terhadap Target Kinerja triwulan I serta target tahun 2025;
3. Analisis penyebab keberhasilan uraian pengaruh terhadap penyesuaian Startegi/aktivitas, Penyesuaian Kebijakan, Penyesuaian Anggaran, Penyesuaian Organisasi/pegawai, Analisa kegagalan (jika kinerja tidak tercapai/ tidak on the right track).
4. Permasalahan/kendala serta alternatif solusi/upaya uraian penyesuaian Startegi/aktivitas, Penyesuaian Kebijakan, Penyesuaian Anggaran, Penyesuaian Organisasi/pegawai yang akan dilaksanakan terhadap pencapaian indikator tahun 2025;
5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional (Benchmarking Kinerja);
6. Capaian lainnya (jika ada);
7. Realisasi anggaran unit kerja dan Per indikator serta pelaksanaan progres fisik pekerjaan tahun 2024;
8. Analisis Efisiensi Sumber Daya (Efisiensi anggran dan Efisiensi Sumber Daya Manusia).

II.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan konsep Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah tertuang Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan analisis SMART Indikator Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, indikator tersebut sebagai pedoman penyusunan dan penetapan target kinerja serta pengukuran kinerja yang harus dicapai oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Pengukuran capaian kinerja



periode triwulan I sesuai dengan penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025.

Untuk pengukuran kinerja pada periode triwulan I tahun 2025 permasing-masing Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan dengan hasil sebagai berikut:

2.1. 1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Konektivitas Jaringan Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana

Sesuai Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana target kinerja sebesar 64,540%. Sesuai dengan rekomendasi pelaporan kinerja tahun 2024 telah dilakukan evaluasi dan penyusunan indikator kinerja untuk Rencana Strategis periode 2025-2029. Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana disusun berdasarkan cascading berjenjang indikator kinerja dari level Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dimana Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana menunjang terwujudnya peningkatan kinerja Konektivitas Transportasi Perkeretaapian serta memenuhi kriteria SMART Indikator Kinerja.

Penentuan target kinerja tahun 2025 sebesar 64,560% berdasarkan perhitungan baseline data kinerja sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 61,430% atau dengan sebanyak 86 dokumen design bidang prasarana perkeretaapian yang telah ditetapkan/disahkan.

2.1. 2. Analisis Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana

Dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan I tahun 2025, realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana sebesar 61,430% atau capaian sesuai dengan target kinerja pada triwulan I tahun 2025. Capaian kinerja periode triwulan I tahun 2025 terdiri dari *Detail Engineering Design* (DED) Prasarana Perkeretaapian sebanyak 80 Dokumen, *Basic Engineering Design* Prasarana Perkeretaapian sebanyak 3 Dokumen, dan Survey Investigasi dan Desain/ STD bidang prasarana perkeretaapian sebanyak 3 Dokumen. Pengukuran capaian kinerja periode triwulan I tahun 2025 berdasarkan target kinerja pada Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025.



Untuk pengukuran kinerja dengan formulasi perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pemenuhan Perencanaan teknis bidang prasarana perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{jumlah penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Prasarana s.d. Tahun 2024 dan jumlah Dokumen Perencanaan teknis bidang prasarana perkeretaapian 2025 s.d tahun 2029}} \times 100\%$$

Sehingga perhitungan Capaian Kinerja sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% \text{ Pemenuhan Perencanaan Teknis bidang Prasarana Perkeretaapian} &= \frac{86 \text{ Dokumen DED/BED/SID/STD}}{140 \text{ Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Prasarana s.d tahun 2029}} \times 100\% \\ &= 61,430\% \end{aligned}$$

Sedangkan perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja triwulan I dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja periode triwulan I sebesar 61,430% dengan target kinerja triwulan I tahun 2025 sebesar 61,430% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja triwulan I sebesar 100% (*on the right track*) atau realisasi capaian kinerja sesuai dengan target kinerja triwulan I yang telah ditetapkan didalam rencana aksi tahun 2025.

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan I sebesar 61,430% dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 64,450%% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 95,314% (*on the right track*). Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 1

Perbandingan capaian kinerja per triwulan dan pertahun
Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis bidang Konektivitas Prasarana

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas prasarana	%	64.540	61.430	61.430	63.570	64.540	61.430				100.000	0.000	0.000	0.000



Untuk diagram perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan pada dengan target kinerja untuk indikator Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar II. 1

Grafik Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis bidang konektivitas Prasarana per triwulan

Untuk target kinerja yang menjadi penambahan capaian kinerja pada periode triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. *Basic Engineering Design* (BED) Beautifikasi Stasiun Padalarang;
2. *Basic Engineering Design* (BED) Beautifikasi Stasiun Klaten Tahap II;
3. *Detail Engineering Design* (DED) Penanganan Daerah Rawan Jalur Kereta Api di KM 227+300/500, KM. 228+100/300, KM. 237+100/200, KM 243+700 - 244+300 Lintas Bandung – Banjar;
4. *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan Balai Yasa KRL untuk mendukung Elektrifikasi Jalur KA Lintas Padalarang – Cicalengka;
5. *Detail Engineering Design* (DED) Jembatan Lintas Lubuk Alung – Kayutanam.

Untuk pelaksanaan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana telah ditetapkan kegiatan pendukung indikator kinerja pada tahun anggaran 2025, Kegiatan pendukung yang menjadi pendukung Indikator Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyusunan Detailed Engineering Design;
- b. Penyelesaian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel ;



d. Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I; dan

e. Surabaya Regional Railway Line (Phase I).

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan tindaklanjut dari kebijakan efisiensi anggaran tahun anggaran 2025 sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : KU.001/1//5/SKJ/2025 tanggal 22 Januari 2025, agar melakukan penundaan sementara untuk proses perikatan/kontrak barang/jasa terutama dari jenis belanja barang dan belanja modal dan melakukan identifikasi kegiatan dan alokasi anggaran prioritas/non prioritas untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Detail pencapaian kegiatan pendukung kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana yang menjadi indikator kinerja berjenjang sebagaimana dijelaskan pada lampiran 3 Laporan Monitoring Kinerja periode triwulan I Tahun 2025 serta sumber data dukung kinerja sebagaimana lampiran 4 pelaporan kinerja berjenjang periode triwulan I tahun 2025.

2.1. 3. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja periode triwulan I Indikator Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana didukung beberapa langkah - langkah telah dilakukan yaitu penetapan target kinerja dan rencana aksi kinerja pada tahun 2025 yaitu sebesar 64,540%. Sampai dengan tahun 2025 periode triwulan I telah dilakukan percepatan dalam proses penyelesaian pemenuhan dokumen perencanaan teknis bidang prasarana perkeretaapian (**Penyesuaian Aktivitas**) diantaranya sebagai berikut :

1. *Basic Engineering Design* (BED) Beautifikasi Stasiun Padalarang, telah dilaksanakan pembahasan antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian Konsultan, dan Tim Inklusif perlu dilakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan dan masukan dari tim inklusif;



2. *Basic Engineering Design* (BED) Beautifikasi Stasiun Klaten Tahap II perbaikan dari konsultan telah diserahkan kepada Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan dilakukan pengecekan terhadap hasil perbaikan dari Konsultan;
3. *Detail Engineering Design* (DED) Penanganan Daerah Rawan Jalur Kereta Api di KM 227+300/500, KM. 228+100/300, KM. 237+100/200, KM 243+700 - 244+300 Lintas Bandung – Banjar perbaikan dari konsultan telah diserahkan kepada Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan dilakukan pengecekan terhadap hasil perbaikan dari Konsultan;
4. *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan Balai Yasa KRL untuk mendukung Elektrifikasi Jalur KA Lintas Padalarang – Cicalengka, telah dilaksanakan pemeriksaan gambar teknis antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
5. *Detail Engineering Design* (DED) Jembatan Lintas Lubuk Alung – Kayutanam, Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja tahun 2024, sebagaimana dijelaskan pada Bab III Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan pada tahun 2024.

Selain itu, pada triwulan I sebagai **penyesuaian strategi/aktivitas** untuk penyelesaian perencanaan teknis bidang prasarana perkeretaapian pada tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan tindaklanjut perbaikan penyusunan *design* dan telah dilaksanakan pembahasan persiapan dokumen readiness kriteria (dokumen Feasibility Studi, SID, Trase) dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api serta Balai-Balai dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pada periode triwulan I telah dilaksanakan evaluasi serta penyusunan indikator kinerja kegiatan melalui konsep Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029 dan telah ditetapkan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis bidang Prasarana Perkeretaapian melalui perjanjian kinerja.

Sebagai pelaksanaan Indikator Kinerja yang mendukung kinerja konektivitas transportasi kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai proses bisnis serta ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana



terdapat **crosscutting** kinerja sesuai dengan proses bisnis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan penyusunan dan penyediaan design berupa *Basic Engineering Design* (BED), Studi Survey Investigasi dan Desain (SID), *Detail Engineering Design* (DED), dan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api melaksanakan penyusunan dan penyediaan dokumen Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur Kereta api serta Jaringan Pelayanan Perkeretaapian (Feasibility Studi, Trase), sedangkan Balai Teknik Perkeretaapian sesuai tugas dan fungsi melaksanakan pembangunan jalur kereta api yang mendukung konektivitas transportasi kereta api.

2.1. 4. Kendala/Hambatan Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan IV tahun 2024 indikator kinerja kegiatan terdapat beberapa kendala dan perlu dilakukan penanganan/pengendalian sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana yaitu, Pada Tahun anggaran 2025 terdapat 8 penyusunan DED sampai dengan periode triwulan I sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KU.001/1/5/SKJ/2025 tentang dukungan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang mana perlu dilakukan penundaan sementara untuk proses perikatan atau kontrak barang/jasa terutama dari jenis belanja barang dan belanja modal sehingga untuk kegiatan kontraktual penyusunan DED belum bisa dilaksanakan, selain itu pada Tahun Anggaran 2025 untuk kegiatan penyusunan DED masih terkendala belum adanya dokumen teknis Feasibility Study (FS) serta Penetapan Trase oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

2.1. 5. Upaya Peningkatan Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana

Sebagai penyesuaian aktivitas/strategi dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan monitoring kinerja triwulan I Tahun 2025 telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja.



Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana sebagai berikut

- a. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian aktivitas adalah :
 1. Akan dilakukan asistensi/pembahasan dokumen gambar design;
 2. Usulan Anggaran tahun 2026 dengan mempertimbangkan kelengkapan readiness kriteria (Feasibility Study (FS) dan Penetapan Trase).
- b. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian Strategi/anggaran adalah :
 1. Akan dilakukan penyesuaian Rencana Penarikan Anggaran serta Revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025;
 2. Revisi Hal 3 DIPA/POK TA 2025.

2.1. 6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (Benchmarking Kinerja)

Untuk laporan kinerja periode triwulan I perbandingan kinerja level nasional Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada indikator kinerja Persentase Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian dengan perbandingan (*benchmarking*) kinerja terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel II. 2
Benchmarking Kinerja Rasio Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana

UNIT KERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana	%	64,540%	61,430%	95,314
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	Persentase Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian	%	23%	7,69%	33,43

Sumber Data : Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Direktorat LLA KA

Untuk diagram perbandingan benchmarking Realisasi Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

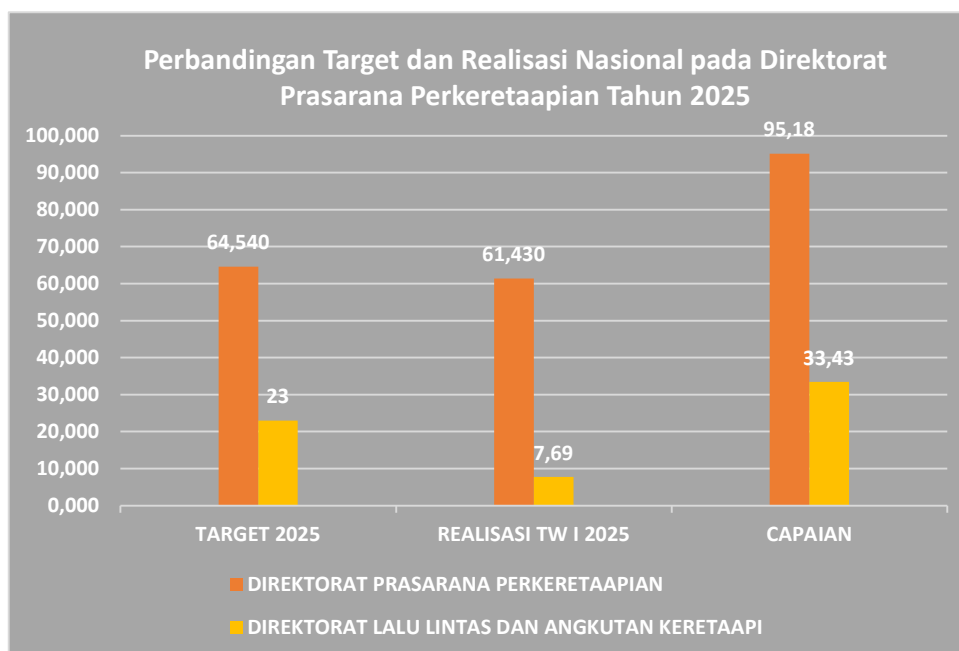
**Gambar II. 2**

Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Nasional pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2024

2.2. 1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengoperasian Jalur KA Sesuai Dengan TQI Kategori I dan II target kinerja sebesar 95,020%.

Penetapan target kinerja berdasarkan konsep rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025 – 2029 dan Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tertuang di Laporan Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2024.

2.2. 2. Analisis Capaian Kinerja Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II

Dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan I tahun 2025, didapatkan hasil realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II sebesar 95,433% atau capaian kinerja dengan Kualitas TQI Jalur Kereta Api Kategori I dan II sepanjang 5.664,892 Km yang terdiri dari Kategori I (kecepatan >100 s.d 120 Km/Jam) di



wilayah Jawa dan Sumatera sepanjang 3.616,140 Km dan Kategori II (kecepatan > 80 s.d 100 Km/jam) di wilayah Jawa dan Sumatera sepanjang 2.048,752 Km.

Untuk pengukuran kinerja dengan formulasi perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pengoperasian Jalur KA Sesuai dengan TQI Kat. I dan II} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yg telah diukur Kategori I dan II}}{\text{Total Panjang Jalur KA}} \times 100\%$$

Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel II. 3

Perhitungan Persentase Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II Triwulan I tahun 2025

Klasifikasi TQI	Kualifikasi		Panjang Jalur (Km'Jalur)	Jalur Terukur Periode IV Tahun 2024 (Km'Jalur)				
TQI A (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam)	Kategori 1	Kecepatan : 100 s.d 120 km/jam	5.935,351	5.934,837	5.664,892	95,443%		
		Kondisi : Nyaman						
	Kategori 2	Kecepatan : 80 s.d 100 km/jam						
		Kondisi : Aman						
TQI B (Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	Kategori 3	Kecepatan : 60 s.d 80 km/jam					269,945	4,548%
		Kondisi : Waspada						
	Kategori 4	Kecepatan : 40 s.d 60 km/jam						
		kondisi : Bahaya						

Sumber data: Laporan hasil pengukuran dengan menggunakan kereta ukur PT.KAI Periode IV tahun 2024

Perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja triwulan I dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja periode triwulan I sebesar 95,443% dengan target kinerja triwulan I tahun 2025 sebesar 95,020% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja triwulan I sebesar 100,445% (*on the right track*) atau realisasi capaian kinerja Triwulan I diatas target kinerja triwulan I berdasarkan penetapan rencana aksi tahun 2025 namun masih *on the right track*. Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan I sebesar 95,443% dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 95,020% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 100,445% (*on the right track*). Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II. 4**

Perbandingan capaian kinerja per triwulan Indikator kinerja kegiatan Persentase Jalur KA sesuai dengan TQI Kategori I dan II

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Persentase Jalur KA sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	95.020	95.020	95.020	95.020	95.020	95.443				100.445	0.000	0.000	0.000

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan pada indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

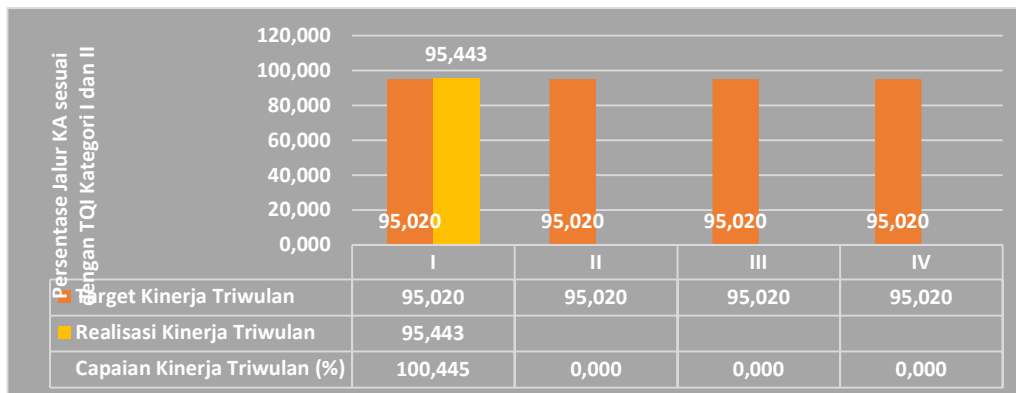
**Gambar II. 3**

Diagram Persentase Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II per triwulan

Rincian perbandingan hasil pengukuran per masing-masing wilayah DAOP dan DIVRE periode III Tahun 2024 dan periode IV tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel II. 5

Rincian Perbandingan Hasil Pengukuran TQI di Wilayah Jawa dan Sumatera Periode III Tahun 2024 dan Periode IV tahun 2024

No	Wilayah	Panjang Track Periode III 2024 (km)	Panjang Terukur Periode III (km)	Panjang Track Periode IV 2024 (km)	Panjang Terukur Periode IV (km)	Kat.1 (Q)			Kat.2 (20<Q<35)			Kat.3 (35<Q<50)			Kat.4 (Q>50)		
						Realisasi periode III 2024	Realisasi periode IV 2024	(meningkat/m enurun)	Realisasi periode III 2024	Realisasi periode IV 2024	(meningkat/menur un)	Realisasi periode III 2024	Realisasi periode IV 2024	(meningkat/m enurun)	Realisasi periode III 2024	Realisasi periode IV 2024	(meningkat/me nurun)
						(km)	(km)		(km)	(km)		(km)	(km)		(km)	(km)	
1	DAOP I JAKARTA	732,291	732,291	732,291	732,291	341,054	354,610	↑ 13,56	324,746	311,780	↓ -12,97	49,971	52,281	↑ 2,31	16,520	13,620	↓ -2,90
2	DAOP II BANDUNG	405,388	405,388	405,388	405,388	143,972	128,726	↓ -15,25	169,369	185,660	↑ 16,29	76,237	79,212	↑ 2,98	15,810	11,790	↓ -4,02
3	DAOP III CIREBON	548,320	548,320	548,320	548,320	479,110	449,146	↓ -29,96	68,329	97,860	↑ 29,53	0,827	1,181	↑ 0,35	0,054	0,133	↑ 0,08
4	DAOP IV SEMARANG	660,888	660,888	660,888	660,888	503,435	507,271	↑ 3,84	151,161	148,089	↓ -3,07	4,645	4,832	↑ 0,19	1,647	0,696	↓ -0,95
5	DAOP V PURWOKERTO	477,942	477,942	477,942	477,942	366,997	374,017	↑ 7,02	109,838	102,690	↓ -7,15	0,966	0,990	↑ 0,02	0,141	0,245	↑ 0,10
6	DAOP VI YOGYAKARTA	385,606	385,606	385,716	385,716	337,617	338,453	↑ 0,84	46,576	45,777	↓ -0,80	1,014	1,172	↑ 0,16	0,399	0,314	↓ -0,09
7	DAOP VII MADIUN	422,579	422,579	422,579	422,579	388,464	387,804	↓ -0,66	33,343	34,337	↑ 0,99	0,772	0,400	↓ -0,37	-	0,038	↑ 0,04
8	DAOP VIII SURABAYA	549,757	549,757	549,757	549,757	366,422	352,933	↓ -13,49	163,729	178,759	↑ 15,03	17,378	16,933	↓ -0,45	2,228	1,132	↓ -1,10
9	DAOP IX JEMBER	261,103	261,103	261,103	261,103	173,243	194,942	↑ 21,70	83,863	62,367	↓ -21,50	3,755	3,603	↓ -0,15	0,242	0,191	↓ -0,05
Jumlah Rata-Rata		4.443,874	4.443,874	4.443,984	4.443,984	3.100,314	3.087,902	↓ -12,41	1.150,954	1.167,319	↑ 16,37	155,565	160,604	↑ 5,04	37,041	28,159	↓ -8,88
1	DIVRE I SUMATERA UTARA	456,656	456,627	456,656	456,270	145,426	253,209	↑ 107,78	289,910	194,912	↓ -95,00	18,497	4,423	↓ -14,07	2,794	3,726	↑ 0,93
2	DIVRE II SUMATERA BARAT	107,044	107,044	107,044	106,916	6,300	14,025	↑ 7,73	84,068	76,702	↓ -7,37	14,898	15,150	↑ 0,25	1,778	1,039	↓ -0,74
3	DIVRE III PALEMBANG	479,488	479,488	479,488	479,488	145,491	167,579	↑ 22,09	307,001	285,885	↓ -21,12	24,825	23,060	↓ -1,77	2,171	2,964	↑ 0,79
4	DIVRE IV TANJUNG KARANG	448,179	448,179	448,179	448,179	91,118	93,425	↑ 2,31	319,368	323,934	↑ 4,57	35,035	29,894	↓ -5,14	2,658	0,926	↓ -1,73
Jumlah Rata-Rata		1.491,367	1.491,338	1.491,367	1.490,853	388,335	528,238	↑ 139,90	1.000,347	881,433	↓ -118,91	93,255	72,527	↓ -20,73	9,401	8,655	↓ -0,75
JUMLAH TOTAL		5.935,241	5.935,212	5.935,351	5.934,837	3.488,649	3.616,140	↑ 127,49	2.151,301	2.048,752	↓ -102,55	248,820	233,131	↓ -15,69	46,442	36,814	↓ -9,63

Sumber data: Laporan hasil pengukuran dengan menggunakan kereta ukur PT.KAI Periode IV tahun 2024



Dari hasil pengukuran TQI sebagaimana Tabel II.6 dilakukan perbandingan kinerja pengukuran TQI periode III tahun 2024 dan kinerja pengukuran TQI periode IV tahun 2024 didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Perbandingan Capaian Kinerja Berdasarkan periode III tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Berdasarkan periode IV tahun 2024 sebagaimana pada Tabel II.6 dengan peningkatan kinerja sebesar 0,423% dari semula 95,020% pada pengukuran periode III tahun 2024 menjadi 95,443% pada pengukuran periode IV tahun 2024;
- b. Sedangkan panjang jalur kereta api yang terukur periode III tahun 2024 dengan panjang 5.935,212 Km dan periode IV tahun 2024 dengan Panjang 5.934,837 Km (lebih panjang jalur yang terukur periode III Tahun 2024 sepanjang 0,375 Km);
- c. Dari hasil pengukuran per kategori perbandingan periode III tahun 2024 dan periode IV tahun 2024 didapatkan hasil sebagai berikut:
 - Kategori I : Realisasi Periode III tahun 2024 sepanjang 3.488,649 Km dan Realisasi Periode IV tahun 2024 sepanjang 3.616,140 Km (terdapat peningkatan panjang TQI Kategori I di periode IV tahun 2024 sepanjang 127,49 Km);
 - Kategori II : Realisasi Periode III tahun 2024 sepanjang 2.151,301 Km dan Realisasi Periode IV tahun 2024 sepanjang 2.048,752 Km (terdapat penurunan panjang TQI Kategori II di periode IV tahun 2024 sepanjang -102,55 Km);
 - Kategori III : Realisasi Periode III tahun 2024 sepanjang 248,820 Km dan Realisasi Periode IV tahun 2024 sepanjang 233,131 Km (terdapat penurunan panjang TQI Kategori III di periode IV tahun 2024 sepanjang -15,69 Km);
 - Kategori IV : Realisasi Periode III tahun 2024 sepanjang 46,442 Km dan Realisasi Periode IV tahun 2024 sepanjang 36,814Km (terdapat penurunan panjang TQI Kategori IV di periode IV tahun 2024 sepanjang -9,63Km);
- d. Dari hasil perbandingan periode III dan periode IV terdapat penurunan pada Kategori III dan Kategori IV yaitu sepanjang 25,32 Km.

Data perbandingan per wilayah DAOP/DIVRE sebagaimana dijelaskan didalam Tabel II.6.

Untuk pengukuran kinerja pada triwulan I Tahun 2025 belum menggunakan data pengukuran TQI periode I Tahun 2025 dikarenakan pengukuran jalur kereta api dilaksanakan pada periode triwulan I tahun 2025 dan perlu



dilakukan pengolahan data hasil pengukuran serta evaluasi hasil pengukuran jalur kereta api TQI periode I yang direncanakan akan dilaksanakan bulan April/Mei 2025.

Sesuai dengan penetapan kegiatan pendukung tahun anggaran 2025 Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi pendukung Persentase Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II diantaranya sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA;
2. Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangun KA; dan
3. Pemeriksaan Jalan Rel dengan KA Ukur di Jawa Sumatera dan Sulawesi.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai kegiatan pendukung tahun anggaran 2025 Indikator Kinerja Persentase Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II dengan anggaran sebesar Rp. 3.017.854.000,00 sesuai dengan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 serta berdasarkan petikan DIPA TA 2025 Nomor : SP DIPA-22.08.1.467484 Revisi Ke 2 tanggal 21 Februari 2025 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : 0085/K3/II/2025 perihal Penyampaian Rincian Penghematan Efisiensi Belanja di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian TA 2025, sisa anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 644.778.000,00. Sampai dengan periode triwulan 1 tahun 2025 untuk pengawasan pembangunan dan peningkatan prasarana perkeretaapian dilakukan dengan metode daring/zoom.

Detail pencapaian kegiatan pendukung kinerja Persentase Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II yang menjadi indikator kinerja berjenjang sebagaimana dijelaskan pada lampiran 3 Laporan Monitoring Kinerja periode triwulan I Tahun 2025 serta sumber data dukung kinerja sebagaimana lampiran 4 pelaporankinerja berjenjang periode triwulan I tahun 2025.



2.2.3. Analisis Keberhasilan dalam Capaian Kinerja Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Sesuai dengan TQI I dan II

Analisis Keberhasilan kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Sesuai dengan TQI I dan II sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja Kegiatan Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Sesuai dengan TQI I dan II didukung beberapa langkah-langkah telah dilakukan yaitu penetapan target tahun 2025 dan rencana aksi tahun 2025.

Sebagai tindaklanjut pengukuran kinerja dan laporan kinerja triwulan IV tahun 2024/Laporan Kinerja Tahun 2024 Telah dilakukan **penyesuaian aktivitas/strategi** yaitu telah dilakukan monitoring dan evaluasi laporan antara antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, PT. Kereta Api Indonesia (persero) dan Balai dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap hasil pengukuran periode 4 tahun 2024 dari PT. Kereta Api Indonesia (persero), dengan hasil sebagai berikut:

Tabel II.6

Tabel Perbandingan Ketagori I dan Kategori II per periode tahun 2024

Wilayah	Presentase Kategori 1 dan 2*			
	TW I	TWII	TW III	TW IV
BTP Medan	90,35%	90,38%	95,34%	98,21%
BTP Padang	80,91%	80,63%	84,45%	84,76%
BTP Palembang	92,57%	92,29%	93,03%	93,87%
BTP Jakarta	90,50%	91,03%	90,92%	91,00%
BTP Bandung	89,40%	89,80%	90,26%	90,32%
BTP Semarang	99,26%	99,39%	99,43%	99,47%
BTP Surabaya	97,41%	97,76%	98,02%	98,19%

Sumber data : Lampiran Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor KA.008/3/5/K3/DJKA/2025

*perhitungan persentase kategori I dan II berdasarkan perbandingan jumlah Panjang Kategori I dan II periode IV dengan Panjang terukur periode IV Tahun 2024

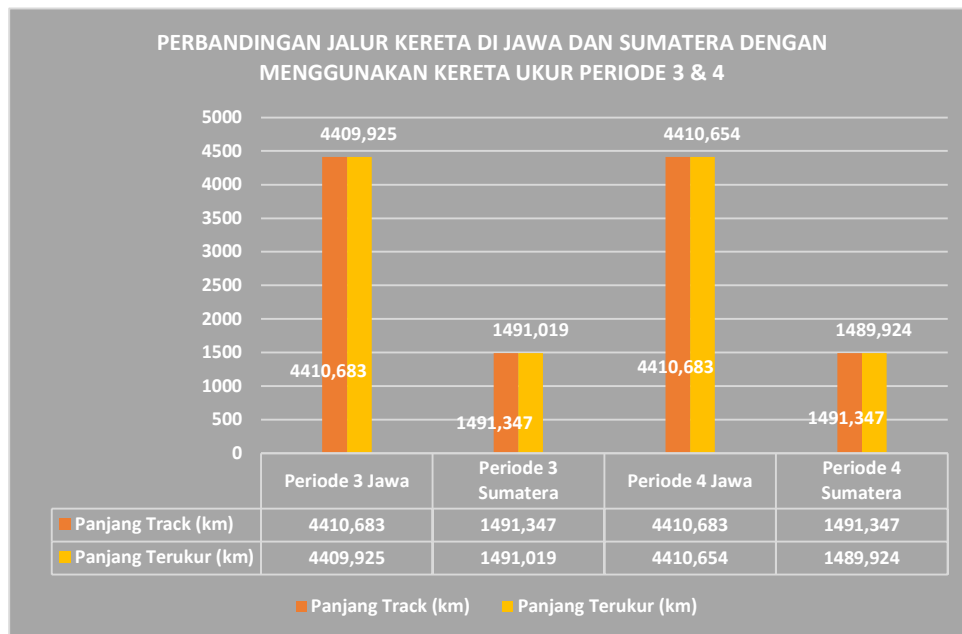
Dari hasil evaluasi TQI periode III sampe dengan dengan periode IV tahun 2024 disimpulkan bahwa, tindak lanjut perawatan jalur kereta api mendukung keberhasilan dalam mempertahankan atau meningkatkan kategori TQI Kategori I dan Kategori II.

Penyesuaian organisasi tahun 2024 yaitu dengan telah dilakukan pembentukan tim evaluasi hasil pengukuran indeks kualitas jalan rel (*Track Quality Index*) dengan Kereta ukur melalui penetapan Surat Keputusan Direktur Prasarana



Perkeretaapian Nomor SK-K3DJKA 11 Tahun 2025 sebagai pelaksanaan Monitoring dan evaluasi hasil pengukuran TQI.

Selain itu untuk pengukuran dengan menggunakan kereta ukur secara periodik ditahun 2024 dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero) bersama Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan perbandingan jalur KA terukur di Jawa dan Sumatera periode I s.d dan IV tahun 2024 sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar II. 5

Perbandingan pengukuran jalur kereta api per periode menggunakan kereta ukur

Untuk perubahan budaya kinerja yang telah dilaksanakan indikator Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Sesuai dengan TQI I dan II Monitoring dan evaluasi bersama terhadap hasil laporan kegiatan pengukuran Track Quality Indeks (TQI) dengan Kereta Ukur per Periode IV Tahun 2024.

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2025 juga didukung pelaksanaan **Crosscutting** kinerja yaitu pengukuran kualitas jalur kereta api/*Track Quality Indeks* serta pengolahan data hasil pengukuran dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero) selama tahun 2024, dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi dilakukan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan jalur kereta api yang dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian sebagai pendukung kinerja peningkatan kualitas jalur



kereta api. Selain itu kinerja kegiatan perawatan jalur kereta api yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan tetap di kategori I dan kategori II serta meningkatkan jalur yang masih di kategori III dan kategori IV menjadi kategori I dan kategori II yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero) melalui sumber pendanaan IMO Tahun Anggaran 2024, melalui penetapan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 63 Tahun 2024 tentang Penugasan Kepada PT KAI (Persero) untuk Melaksanakan perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian milik Negara tahun Anggaran 2024 melalui anggaran IMO TA 2024 yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Perkeretaapian.

Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja tahun 2024, sebagaimana dijelaskan pada Bab III Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan pada tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.

2.2. 4. Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan IV tahun 2024 indikator kinerja kegiatan Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II terdapat kendala dan perlu dilakukan penanganan/pengendalian sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Beberapa kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II adalah sebagai berikut :

- a. Lanjutan penyusunan pedoman Standar TQI belum bisa dilakukan pada periode triwulan I tahun 2025;
- b. Pengukuran bersama TQI dengan PT. KAI belum bisa dilaksanakan;
- c. Penghematan Anggaran sebesar 50% untuk anggaran Perjalanan Dinas sesuai dengan Penetapan DIPA TA 2025 pada tanggal 2 Desember 2024.

2.2. 5. Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau



rekomendasi peningkatan kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II sebagai berikut:

- a. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian aktivitas adalah:
 1. Akan dilakukan pembahasan penyusunan Pedoman Standar TQI pada bulan Mei 2025;
 2. Akan dilakukan koordinasi permintaan hasil pengukuran periode I Tahun 2025 dan direncanakan akan dilakukan evaluasi hasil pengukuran TQI;
 3. Evaluasi Perjanjian Kinerja serta rencana aksi atas perjanjian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025
- b. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian Anggaran adalah Evaluasi Rencana Penyerapan Anggaran a untuk monitoring dan evaluasi Pembangunan/peningkatan Jalur Kereta Api dan Bimbingan Teknis Bidang Jalur Kereta Api serta Pemeriksaan Jalan Rel dengan KA Ukur di Jawa, Sumatera dan Sulawesi serta penyesuaian rencana aksi tahun 2025.

2.2. 6. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II dengan target RPJMN 2025-2029 (Target Nasional)

Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 Indikator Kinerja Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II dengan target nasional/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (RPJMN) Indikator Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar TQI Kategori I dan II dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



Gambar II. 7
Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025 dengan Target RPJMN



Dari gambar diagram diatas perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target Nasional/RPJMN 2025-2029 telah melebihi target dengan capaian sebesar 101,535% dan masih *on the right track*.

2.3. 1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian dengan Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal target kinerja sebesar 65,270%.

Penetapan target kinerja berdasarkan konsep rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025 – 2029 dan Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tertuang di Laporan Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2024.

2.3. 2. Analisis Capaian Kinerja Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal

Dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal periode triwulan I tahun 2025 sebesar 64,430% atau capaian sesuai dengan revisi rencana aksi target kinerja pada triwulan I tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja periode triwulan I tahun 2025 berdasarkan target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025.

Untuk pengukuran kinerja dengan formulasi perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$\text{Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal} = \frac{\text{Jumlah Unit Persinyalan Fasilitas Operasi yang berbasis Elektrik s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Unit Persinyalan Fasilitas Operasi berbasis elektrik dan mekanik Eksisting sd tahun berjalan dan rencana pembangunan Fasilitas Operasi Elektrik pada Tahun 2025 s.d. 2029}} \times 100\%$$

Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Persentase FASOPKA handal} = \frac{(384) \text{ unit}}{596 \text{ unit}} \times 100\% = 63,430\%$$



Sedangkan perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja triwulan I dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja periode triwulan I sebesar 64,430% dengan target kinerja triwulan I tahun 2025 sebesar 64,430% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja triwulan I sebesar 100% (*on the right track*) atau realisasi capaian kinerja sesuai dengan target kinerja triwulan I yang telah ditetapkan didalam rencana aksi tahun 2025.

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan I sebesar 64,430% dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 65,270% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 98,713% (*on the right track*), atau target kinerja tahunan direncanakan tercapai di Triwulan IV Tahun 2025.

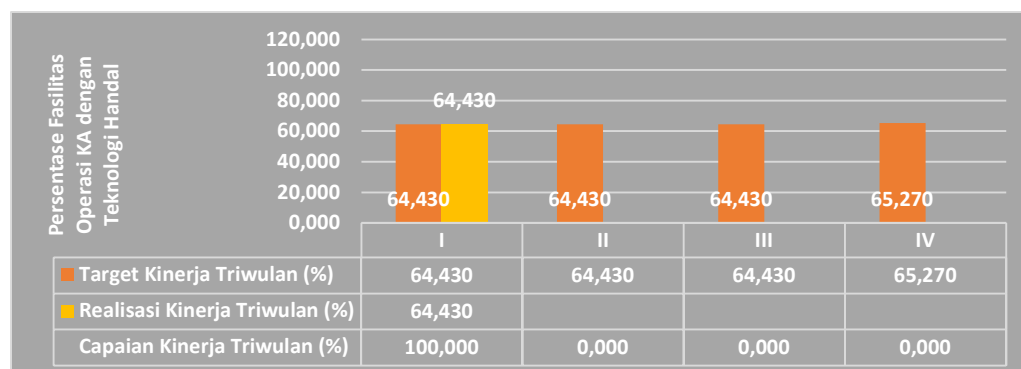
Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 8

Perbandingan capaian kinerja per triwulan
Indikator kinerja kegiatan Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Persentase Fasilitas Operasi KA dengan Teknologi Handal	%	65.270	64.430	64.430	64.430	65.270	64.430				100.000	0.000	0.000	0.000

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan pada indikator Kinerja Kegiatan Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar II. 8

Grafik Capaian Kinerja Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal per triwulan



Berikut merupakan rincian jumlah sistem persinyalan dengan interlocking elektrik dan sistem persinyalan dengan interlocking mekanik di wilayah Jawa dan Sumatera sampai dengan akhir periode Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II. 9

Rincian Jumlah persinyalan elektrik dan mekanik wilayah Jawa dan Sumatera s.d Triwulan I tahun 2025

NO	WILAYAH KERJA	INTERLOCKING SISTEM PERSINYALAN			
		SISTEM PERSINYALAN (ELEKTRIK & MEKANIK)	ELEKTRIK	MEKANIK	IB
1	BTP KELAS I JAKARTA	64	63	1	50
2	BTP KELAS I BANDUNG	90	63	27	14
3	BTP KELAS I SEMARANG	120	105	15	13
4	BTP KELAS I SURABAYA	116	44	72	12
5	BTP KELAS I MEDAN	56	31	25	0
6	BTP KELAS II PADANG	12	0	12	0
7	BTP KELAS II PALEMBANG	83	23	60	9
8	BPKARSS	14	14	-	-
9	BPKASS	14	14	-	-
10	LRT JABODEBEK	1	1	-	-
11	LRT JAKARTA	6	6	-	-
12	MRT JAKARTA	13	13	-	-
13	KCIC	4	4	-	-
14	APMS	3	3	-	-
TOTAL		596	384	212	98



Perhitungan realisasi pada indikator kinerja kegiatan persentase Fasilitas Operasi dengan teknologi handal yaitu sebesar 64,430% dengan formulasi perhitungan kinerja dari baseline sistem persinyalan dengan interlocking elektrik sebanyak 384 unit.

Untuk pelaksanaan indikator kinerja Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi handal telah ditetapkan kegiatan pendukung indikator kinerja pada Tahun Anggaran 2025 pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian, kegiatan pendukung yang menjadi pendukung indikator kinerja Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi handal diantaranya sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Bidang Fasilitas Operasi Kereta Api;
2. Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I; dan
3. Pemeriksaan dan Pengawasan Prasarana Fasilitas Operasi Kereta Api.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai kegiatan pendukung tahun anggaran 2025 Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal dengan anggaran swakelola sebesar Rp. 885.110.000,00 sesuai dengan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 serta berdasarkan petikan DIPA TA 2025 Nomor : SP DIPA-22.08.1.467484 Revisi Ke 2 tanggal 21 Februari 2025 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : 0085/K3/II/2025 perihal Penyampaian Rincian Penghematan Efisiensi Belanja di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian TA 2025, sisa anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 266.877.000,00. Sampai dengan periode triwulan 1 tahun 2025 untuk pengawasan pembangunan dan peningkatan prasarana perkeretaapian dilakukan dengan metode daring/zoom.

Detail pencapaian kegiatan pendukung kinerja Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal yang menjadi indikator kinerja berjenjang sebagaimana dijelaskan pada lampiran 3 Laporan Monitoring Kinerja periode triwulan I Tahun 2025 serta sumber data dukung kinerja sebagaimana lampiran 4 pelaporan kinerja berjenjang periode triwulan I tahun 2025.

2.3. 3. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Kegiatan Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal sesuai dengan hasil monitoring dan



pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal didukung beberapa langkah-langkah telah dilakukan yaitu penetapan target tahun 2025 dan rencana aksi tahun 2025. Sebagai tindak lanjut pengukuran kinerja dan laporan kinerja triwulan IV tahun 2024/Laporan Kinerja Tahun 2024 Telah dilakukan **penyesuaian aktivitas/strategi** yaitu telah disampaikan hasil evaluasi/ pemeriksaan dokumen teknis perizinan pembangunan prasarana perkeretaapian umum wilayah segmen I Lahat - Kertapati kepada PT KAI berdasarkan surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor: KA.008/2/25/K3/DJKA/2025 tanggal 28 Februari 2025 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Dokumen Teknis Perizinan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian di Stasiun Gunung Megang dan Perizinan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Jalur V dan VI Emplasemen Depo Simpang tahap II dan Telah disampaikan hasil evaluasi/ pemeriksaan dokumen teknis perizinan pembangunan prasarana perkeretaapian umum wilayah segmen I Lahat - Kertapati kepada PT KAI berdasarkan surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor: KA.008/4/8/K3/DJKA/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi/ Pemeriksaan Dokumen Teknis Perizinan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Wilayah Segmen I Lintas Lahat – Kertapati untuk perizinan pembangunan sistem persinyalan elektrik dan intermediate blok lintas Prabumulih-Simpang.

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2025 juga didukung pelaksanaan **Crosscutting** kinerja yaitu pembangunan/peningkatan system persinyalan elektrik dilaksanakan oleh Balai sesuai dengan wilayah kerja dan investasi pembangunan PT. Kereta Api Indonesia (persero), dan proses pengujian dilakukan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian serta pengendalian perizinan pembangunan prasarana perkeretaapian umum/khusus dan pelaksanaan monitoring, evaluasi pembangunan/peningkatan, sertifikasi kelaikan sesuai proses bisnis dilaksanakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja tahun 2024, sebagaimana dijelaskan pada Bab III Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan pada tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.



2.3. 4. Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan I tahun 2024 indikator kinerja kegiatan Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal terdapat kendala dan perlu dilakukan penanganan sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal yaitu Penghematan Anggaran sebesar 50% untuk anggaran Perjalanan Dinas sesuai dengan Penetapan DIPA TA 2025 pada tanggal 2 Desember 2024.

2.3. 5. Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal sebagai berikut:

- a. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian Aktivitas/Strategi adalah koordinasi dengan PT. Kereta Api Indonesia (persero) melalui surat penyampaian hasil asistensi gambar teknis kepada PT. KAI untuk dapat diproses lanjut;
- b. Evaluasi data kinerja Bidang Fasilitas Operasi Kereta Api
- c. Evaluasi Perjanjian Kinerja serta rencana aksi atas perjanjian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 kegiatan pendukung indikator kinerja.

2.4. 1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan target pada tahun 2024 nilai 3,890 atau Sangat Baik.

Pengukuran kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana



Perkeretaapian berdasarkan hasil pengisian Survei melalui aplikasi 3A IPK (Indeks Persepsi Korupsi) – IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kepuasan Masyarakat (SKM) Direktorat Prasarana Perkeretaapian oleh para pengguna jasa pelayanan bidang prasarana perkeretaapian. Untuk standar nilai rata-rata capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai Skala 1-4).

2.4.2. Analisis Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan I tahun 2025, realisasi capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan realisasi kinerja 3,886 dengan kategori penilaian Sangat Baik.

Capaian kinerja periode triwulan I Tahun 2025 merupakan perhitungan dari rata-rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada periode triwulan I (bulan Januari s.d bulan Maret tahun 2025). Dasar penentuan kategori penilaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II. 10
Tabel Nilai Skala Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017



Untuk pengukuran kinerja dengan formulasi perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Dit. Prasarana Perkeretaapian}}{\text{Penjumlahan Nilai IKM periode bulan Tahun 2025}} = \frac{\text{Jumlah Periode bulan Tahun 2025}}{\text{Jumlah Periode bulan Tahun 2025}}$$

Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Sumber Data : Nilai IKM Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : UM.006/1/17/K3/DJKA/2025

$$\frac{\text{IKM Pelayanan Publik yang diselenggarakan Dit. Prasarana Perkeretaapian}}{(3,745 + 4 + 3,912)} = \frac{3}{3} = 3,886$$

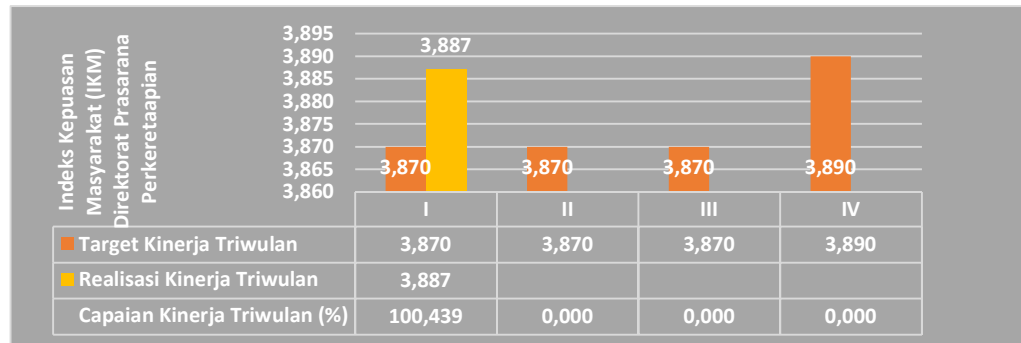
Perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja triwulan I dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja periode triwulan I sebesar 3,886% dengan target kinerja triwulan I tahun 2025 sebesar 3,870% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja triwulan I sebesar 100,413% (*on the right track*) atau realisasi capaian kinerja Triwulan I diatas target kinerja triwulan I berdasarkan penetapan rencana aksi tahun 2025 namun masih *on the right track*. Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan I sebesar 3,886% dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 3,890% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 99,923% (*on the right track*). Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel II. 11
Perbandingan capaian kinerja per triwulan
Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3.890	3.870	3.870	3.870	3.890	3.887				100.439	0.000	0.000	0.000



Untuk diagram perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar II.9

Grafik Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian per triwulan

Berikut merupakan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode triwulan I dari hasil Survey Kepuasan masyarakat dari bulan Januari sampai dengan Maret sebagai berikut:

Tabel II. 12

Hasil Survey melalui aplikasi 3A IPK (Indeks Persepsi Korupsi) – IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kepuasan Masyarakat (SKM) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No	Bulan	Nilai IKM	Jml Respon den	Informa si	Persyara tan	Alur	Waktu Penyelesai an	Tarif/ Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi Pengaduan
1.	Januari	3,75	5	3,76	3,76	3,76	3,64	4	3,64	3,64	3,89
2.	Februari	4,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	Maret	3,91	6	3,90	4	3,90	3,90	4	3,80	3,90	3,90
Nilai Agregat		3.886	15	3,89	3,92	3,89	3,85	4	3,81	3,85	3,89

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui pengisian Survei melalui aplikasi 3A IPK (Indeks Persepsi Korupsi) – IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kepuasan Masyarakat (SKM) Direktorat Prasarana Perkeretaapian oleh para pengguna jasa pelayanan bidang prasarana perkeretaapian periode triwulan I tahun 2025.

Detail pencapaian kegiatan pendukung kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang menjadi indikator kinerja berjenjang



sebagaimana dijelaskan pada lampiran 3 Laporan Monitoring Kinerja periode triwulan I Tahun 2025 serta sumber data dukung kinerja sebagaimana lampiran 4 pelaporan kinerja berjenjang periode triwulan I tahun 2025.

2.4. 3. Analisis Keberhasilan dalam Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian didukung beberapa langkah-langkah telah dilakukan yaitu penetapan target tahun 2025 dan rencana aksi tahun 2025.

Sebagai tindaklanjut pengukuran kinerja dan laporan kinerja triwulan I tahun 2024/Laporan Kinerja Tahun 2024 Telah dilakukan **penyesuaian aktivitas/strategi** yaitu penyelesaian proses perizinan bidang prasarana perkeretaapian periode triwulan I tahun 2025 (Januari s.d Maret 2025) sebanyak 13 Pelayanan bidang prasarana perkeretaapian yang telah selesai/diterbitkan terdiri dari :

1. Pelayanan Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain sebanyak 11 Penetapan
2. Pelayanan sertifikasi komponen prasarana perkeretaapian sebanyak 2 penetapan sertifikasi.

Selain itu sesuai dengan penyesuaian aktivitas telah dilakukan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat periode triwulan I berdasarkan hasil analisis survei, dari Laporan SKM Periode Triwulan Ke-I Tahun 2025 periode bulan Januari – Maret 2025 sebagai berikut:

1. Analisis Hasil Survei Pelayanan – IKM pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Maret 2025, Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.886 dalam skala 4 atau dalam skala 17,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.



Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d Maret 2025. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Analisis Hasil Perilaku Penyimpangan Pelayanan – IPK pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Maret 2025, Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.93 dalam skala 4 atau 17,19 dalam skala 17,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d Maret 2025. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik

Selain itu, keberhasilan dengan telah dilakukan **penyesuaian aktivitas dan sebagai tahapan penerapan inovasi kinerja** telah dilaksanakan koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait penyelesaian sinkronisasi *Single Sign On* (SSO) untuk Aplikasi Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dan aplikasi Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian

Selain itu, penyesuaian aktivitas dilakukan dengan menjada komunikasi yang baik dengan pemohon untuk memberikan asistensi terkait persyaratan dan perihal teknis serta kekurangan data teknis yang harus dilengkapi secara resmi oleh pemohon serta unit kerja sehingga penyelesaian pelayanan (perizinan dan sertifikasi) bisa selesai tepat waktu.

Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi



peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja, sebagaimana dijelaskan pada Bab III Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan pada tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.

2.4. 4. Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan III tahun 2024 indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat kendala dan perlu dilakukan penanganan sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah untuk penyelesaian aplikasi pelayanan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian masih terkendala proses pembayaran PNBK dikarenakan sinkronisasi dengan aplikasi SIMPONI terdapat Error API.

2.4. 5. Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik sebagai berikut:

Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian aktivitas/strategi adalah:

1. Akan dilakukan pengecekan/memastikan kembali token/API key tidak expired serta memeriksa resource data
2. Akan dilakukan Launching Aplikasi Perzinan Perpotongan dan/atau persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain serta Aplikasi Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian;



3. Aktif menyebarkan link survei kepuasan masyarakat unit kerja kepada pemohon/pengguna jasa unit kerja, menjaga komunikasi yang baik dengan pemohon, serta menjelaskan tentang tujuan dari pelaksanaan SKM; dan
4. Penyelesaian permohonan perizinan yang masih berproses sampai akhir periode triwulan I tahun 2025

2.4. 6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (Benchmarking Kinerja)

Dari hasil perbandingan kinerja level nasional untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian diketahui bahwa kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian berkontribusi untuk kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan capaian sebesar 101,59% dengan perbandingan (benchmarking) kinerja terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel II. 13

Benchmarking Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

UNIT KERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,870	3,886	100,413
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAPIAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740	3,810	101,871

Untuk diagram perbandingan benchmarking Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

**Gambar II. 10**

Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Nasional pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2024

2.5. 1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian dengan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 pada Indikator Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan target kinerja sebesar 50,340%. Dengan target kinerja tahun 2025 adalah sebanyak 85 sertifikat terdiri dari sebanyak 35 sertifikasi kelaikan prasarana jalur dan bangunan kereta api serta 50 sertifikasi kelaikan prasarana fasilitas operasi kereta api, dengan total target sertifikasi sampai dengan tahun 2029 sebesar 3.084 sertifikat.

Penetapan target kinerja berdasarkan konsep rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025 – 2029 dan Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tertuang di Laporan Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2024.

2.5. 2. Analisis Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan I tahun 2025, realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sebesar 48,379% atau Capaian Kinerja periode



triwulan I tahun 2025 dengan penetapan sertifikat kelaikan prasarana sebanyak 22 sertifikat terdiri dari 6 sertifikat kelaikan jalur dan bangunan kereta api dan 16 sertifikat kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Untuk pengukuran kinerja dengan formulasi perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana} = \frac{\text{Jumlah Prasarana yang sudah Tersertifikasi Kelaikan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sertifikasi Kelaikan pada tahun berjalan dan rencana kebutuhan Sertifikasi Kelaikan s.d. 2029}} \times 100\%$$

Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% \text{ Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana KA} &= \frac{(1.470+2) \text{ Sertifikat}}{3084 \text{ Sertifikat}} \times 100\% \\ &= 48,379 \% \end{aligned}$$

Sedangkan perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja triwulan I dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja periode triwulan I sebesar 48,379% (*on the right track*) dengan target kinerja triwulan I tahun 2025 sebesar 47,670%, didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja triwulan I sebesar 101,487% (*on the right track*) atau realisasi capaian kinerja Triwulan I diatas target kinerja triwulan I berdasarkan penetapan rencana aksi tahun 2025.

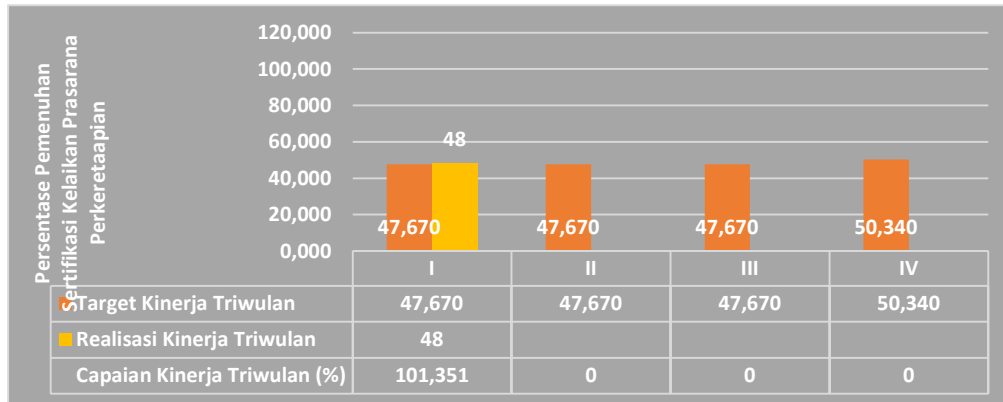
Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan I sebesar 48,379% dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 50,340% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 95,590% (*on the right track*). Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.14
Perbandingan capaian kinerja per triwulan
Indikator kinerja kegiatan Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50.340	47.670	47.670	47.670	50.340	48				101.351	0	0	0



Untuk diagram perbandingan capaian kinerja pertriwulan dan tahunan pada indikator kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar II.11

Diagram perbandingan Persentase Prasarana Perkeretaapian Yang Telah Memiliki Sertifikasi Kelaikan (Jalur, Bangunan, Fasilitas Operasi)

Berikut merupakan rincian capaian kinerja jumlah sertifikat kelaikan prasarana perkeretaapian yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode triwulan I tahun 2025:

Tabel II. 15

Rincian Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

No	Uraian	Capaian Bulan	Jumlah (Sertifikat)
Sertifikat Kelaikan Jalur dan Bangunan KA			
1	Uji Pertama :		
a	Sertifikat Uji Pertama Prasarana Perkeretaapian berupa Bangunan Stasiun Kereta Api (Kampung Juar dan Pauh Lima) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Kereta Api Padang - Bukit Putus - Pauh Lima Hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Februari	4
3	Uji Komponen :		
a	Sertifikatn Uji Komponen Bantalan Beton Monoblok untuk Jalur KA ballasted Lebar Jalan Rel 1067 mm Produksi PT Wijaya Karya Beton, Tbk.	Januari	1
b	Sertifikasi Uji Komponen Bantalan Beton (Jalur Kereta Api Ballasted) untuk Lebar Jalan Rel 1067 mm Beban Gandar 18 Ton Produksi PT Balton Kurnia Abadi menggunakan Sistem Penambat Elastic Rail Clip tipe Material 60SI2MN Produksi PT Dibiya Upaya Persada	Maret	1
Jumlah Sertikat kelaikan Jalur dan Bangunan KA			6



No	Uraian	Capaian Bulan	Jumlah (Sertifikat)
Sertifikat Kelaikan Fasilitas Operasi KA			
1	Uji Pertama		
a	Sertifikat uji pertama JPL Solo - Wonogiri (9 Januari 2025)	Januari	4
b	Sertifikat uji pertama Radio Telekomunikasi Jabodetebek (16 Januari 2025)	Januari	7
c	Sertifikat Uji Pertama JPL 172a Dan JPL 173 antara Stasiun Haurpugur - Stasiun Cicalengka di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung Nomor KP-DJKA 48 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025	Maret	2
2	Uji Berkala		
a	Sertifikasi Uji Berkala Listrik Aliran Bawah APMS Bandara Internasional Soekarno - Hatta : KP-DJKA 33 Tahun 2025 tanggal 6 Maret 2025	Maret	3
Jumlah Sertikat kelaikan Fasilitas Operasi KA			16
Jumlah Sertikat kelaikan Prasarana Perkeretaapian			22

Untuk pelaksanaan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian telah ditetapkan kegiatan pendukung indikator kinerja pada tahun anggaran 2025, Kegiatan pendukung yang menjadi pendukung Indikator Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian diantaranya sebagai berikut:

1. Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Perkeretaapian;
2. Peningkatan Pemahaman SDM Bidang Prasarana Perkeretaapian;
3. Pengoperasian dan Perawatan/Rehabilitasi Jalur, Jembatan, Stasiun, dan Fasilitas Operasi Kereta Api; dan
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai kegiatan pendukung tahun anggaran 2025 Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan anggaran sebesar Rp. 2.098.163.000,00 sesuai dengan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 serta berdasarkan petikan DIPA TA 2025 Nomor : SP DIPA-22.08.1.467484 Revisi Ke 2 tanggal 21 Februari 2025 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : 0085/K3/II/2025



perihal Penyampaian Rincian Penghematan Efisiensi Belanja di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian TA 2025, sisa anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 604.807.000,00. Sampai dengan periode triwulan 1 tahun 2025 untuk pengawasan monitoring pelaksanaan pengujian belum ada pelaksanaan kegiatan.

Untuk kegiatan pengawasan Jasa Konsultansi Manajemen Pelaksanaan IMO sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : KU.001/2/4/DJKA/2025 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : KU.002/2/15/SKJ/2025 telah dilakukan usulan Revisi Anggaran Relaksasi Buka Blokir Efisiensi di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian TA 2025 dan sesuai dengan Revisi DIPA/POK ke 4 telah disahkan buka blokir pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Pelaksanaan IMO dengan pagu Rp. 2.430.411.000,00..

Detail pencapaian kegiatan pendukung kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana yang menjadi indikator kinerja berjenjang sebagaimana dijelaskan pada lampiran 3 Laporan Monitoring Kinerja periode triwulan I Tahun 2025 serta sumber data dukung kinerja sebagaimana lampiran 4 pelaporankinerja berjenjang periode triwulan I tahun 2025.

2.5.3. Analisis Keberhasilan dalam Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja didukung beberapa langkah-langkah didukung telah dilakukan yaitu penetapan target tahun 2025 dan rencana aksi tahun 2025.

Sebagai tindaklanjut pengukuran kinerja dan laporan kinerja triwulan IV tahun 2024/Laporan Kinerja Tahun 2024 Telah dilakukan **penyesuaian aktivitas/strategi** penyelesaian sertifikasi prasarana perkeretaapian pada periode Triwulan I sebanyak 22 Sertifikat Kelaikan Prasarana terdiri dari 6 sertifikasi kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api dan 16 Sertifikasi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api. Selain itu pada triwulan I telah dilaksanakan **penyesuaian Startegi/Anggaran** berupa Jasa Konsultansi Manajemen Pelaksanaan IMO telah dilakukan usulan Revisi Anggaran Relaksasi Buka Blokir Efisiensi di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian TA 2025 kepada Kementerian Keuangan untuk pekerjaan



Jasa Konsultasi Manajemen Pelaksanaan IMO dengan pagu Rp. 2.430.411.000,00.

Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian terdapat ***crosscutting kinerja*** yang telah ditetapkan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi dan proses bisnis unit kerja. ***Crosscutting kinerja*** Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian adalah dengan Balai Pengujian Perkeretaapian yang melakukan pengujian prasarana perkeretaapian sesuai dengan permohonan pengujian baik uji pertama prasarana perkeretaapian maupun uji berkala prasarana perkeretaapian (jalur dan bangunan kereta api serta fasilitas operasi kereta api) dan pengawasan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian serta proses sertifikasi dilakukan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

Selain itu untuk **penyesuaian aktivitas** atau **tahapan penerapan inovasi** telah dilaksanakan koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait penyelesaian sinkronisasi *Single Sign On* (SSO) untuk aplikasi Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian

Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja tahun 2024, sebagaimana dijelaskan pada Bab III Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan pada tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.

2.5. 4. Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan I tahun 2025 terdapat kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

1. Untuk penyelesaian aplikasi pelayanan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian masih terkendala proses pembayaran PNBP dikarenakan sinkronisasi dengan aplikasi SIMPONI terdapat Error API.
2. Penghematan Anggaran sebesar 50% untuk anggaran Perjalanan Dinas sesuai dengan Penetapan DIPA TA 2025 pada tanggal 2 Desember 2025.



2.5. 5. Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran serta penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut:

- a. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian aktivitas adalah:
 1. Akan dilakukan pengecekan/memastikan kembali token/API key tidak expired serta memeriksa resource datadan
 2. Evaluasi Perjanjian Kinerja serta rencana aksi atas perjanjian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025
 3. Percepatan proses kontraktual Jasa Konsultansi Pengawasan IMO dan berkoordinasi dengan Balai terkait persiapan pelaksanaan IMO Tahun 2025.
- b. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian Anggaran dengan melakukan penyesuaian rencana penyerapan anggaran pada kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Kelaikan prasarana Perkeretaapian dan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kelaikan Prasarana Perkeretaapian.

2.6. 1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 pada Indikator Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian yaitu sebesar 90,480%. Pemenuhan yang menjadi target kinerja tahun 2025 sebanyak sebanyak 84 dokumen NSPK/Peraturan yang telah selesai disusun/ditetapkan pada tahun 2024.

Penetapan target kinerja berdasarkan konsep rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025 – 2029 dan Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tertuang di Laporan Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2024.



2.6.2. Analisis Capaian Kinerja Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan I tahun 2025, realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian sebesar 87,059% atau persentase capaian kinerja sebesar 100,183%.

Untuk pengukuran kinerja dengan formulasi perhitungan kinerja sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan/diusulkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian s.d 2029}} \times 100\%$$

Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pemenuhan NSPK} &= \frac{(73+1) \text{ Dokumen NSPK}}{85 \text{ Dokumen NSPK}} \times 100\% \\ &= 87,059\% \end{aligned}$$

Sedangkan perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja triwulan I dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja periode triwulan I sebesar 87,059% dengan target kinerja triwulan I tahun 2025 sebesar 86,900% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja triwulan I sebesar 101,370% atau realisasi capaian kinerja melebihi target kinerja triwulan I yang telah ditetapkan didalam revisi rencana aksi tahun 2025 namun masih *on the right track*.

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan I sebesar 87,059% dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 90,480% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 96,014% (*on the right track*). Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

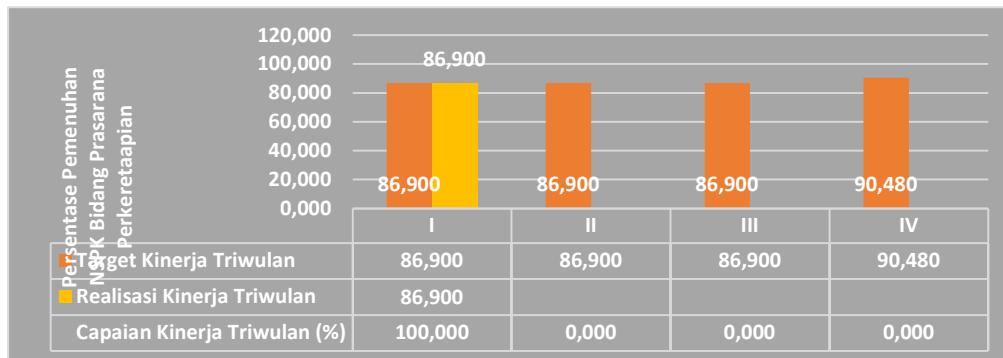
Tabel II.16
Perbandingan capaian kinerja per triwulan
Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV



Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	90.480	86.900	86.900	86.900	90.480	86.900				100.000	0.000	0.000	0.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	---------	-------	-------	-------

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja pertriwulan dan tahunan pada indikator Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar II. 12

Diagram perbandingan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Berikut merupakan rincian jumlah NSPK/Peraturan bidang prasarana perkeretaapian yang telah selesai disusun/ditetapkan sampai dengan periode akhir triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel II.17

Capaian kinerja NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

NO	JUDUL NSPK
Capaian Tahun 2025	
1	KP-DJKA 47 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Pada Balai Teknik Perkeretaapian

Untuk pelaksanaan indikator kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian telah ditetapkan kegiatan pendukung indikator kinerja pada tahun anggaran 2025, Kegiatan pendukung yang menjadi pendukung Indikator Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian diantaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan Norma Standar Pedoman Spesifikasi Teknis Kriteria Dan Prosedur Bidang Prasarana Perkeretaapian;



2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop) Tentang Organisasi Dan Tata Kerja;
3. Kajian Reviu PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain; dan
4. Kajian Reviu Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2021.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai kegiatan pendukung tahun anggaran 2025 Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian dengan anggaran sebesar Rp. 853.638.000,00 sesuai dengan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 serta berdasarkan petikan DIPA TA 2025 Nomor : SP DIPA-22.08.1.467484 Revisi Ke 2 tanggal 21 Februari 2025 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : 0085/K3/II/2025 perihal Penyampaian Rincian Penghematan Efisiensi Belanja di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian TA 2025, sisa anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 47.644.000,00.

Untuk kegiatan Kajian pada tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan kajian NSPK, sampai dengan Triwulan I belum bisa dilakukan kontraktual dikarenakan efisiensi anggaran.

Detail pencapaian kegiatan pendukung kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana yang menjadi indikator kinerja berjenjang sebagaimana dijelaskan pada lampiran 3 Laporan Monitoring Kinerja periode triwulan I Tahun 2025 serta sumber data dukung kinerja sebagaimana lampiran 4 pelaporankinerja berjenjang periode triwulan I tahun 2025.

2.6. 3. Analisis Keberhasilan dalam Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian didukung beberapa langkah-langkah telah dilakukan yaitu penetapan target tahun 2025 dan rencana aksi tahun 2025.



Sebagai tindak lanjut pengukuran kinerja dan laporan kinerja triwulan IV tahun 2024/Laporan Kinerja Tahun 2024 Telah dilakukan **penyesuaian aktivitas** yaitu telah selesai dilaksanakan pembahasan penyusunan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian dan telah ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : KP-DJKA 47 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana perkeretaapian Milik Negara pada Balai Teknik Perkeretaapian yang terdiri dari :

1. Standar Operasional Prosedur Inventarisasi dan Penilaian Berkala atas Kondisi Prasarana Perkeretaapian (Barang Milik Negara);
2. Standar Operasional Prosedur Penetapan Rencana Kinerja Perawatan dan Pengoperasian prasarana Perkeretaapian;
3. Standar Operasional Prosedur Kebutuhan Penganggaran Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian;
4. Standar Operasional Prosedur Penugasan Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian;
5. Standar Operasional Prosedur Verifikasi Laporan Penyelenggaraan dan Pencapaian Kinerja Perawatan dan Pengoperasian Prasarana perkeretaapian
6. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Laporan Penyelenggaraan dan Pencapaian Kinerja Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian oleh Tim Verifikasi
7. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian

Selain itu, untuk proses penyusunan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro dan Mikro bidang Prasarana Perkeretaapian telah selesai dilakukan pembahasan dan penyusunan.

Terdapat NSPK yang masih dilakukan penyusunan dan pembahasan yang akan pada tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2012
2. Pedoman Standar Track Quality Indeks
3. Revisi PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian
4. Pedoman Teknis Sertifikasi Sistem Jalur dan Bangunan Kereta Api

Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja tahun 2024, sebagaimana



dijelaskan pada Bab III Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan pada tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.

Secara umum untuk NSPK yang masih proses penyusunan perlu dilakukan pembahasan dan kajian lanjut dan akan dilanjutkan pada tahun 2025.

Crosscutting kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian adalah dengan Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai penyiapan perumusan draft NSPK dan Setditjen Perkeretaapian sebagai proses penetapan legislasi.

2.6. 4. Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan II tahun 2024 indikator kinerja kegiatan terdapat beberapa kendala dan perlu dilakukan penanganan/pengendalian sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana yaitu, Pada Tahun anggaran 2025 terdapat 2 penyusunan Kajian NSPK sampai dengan periode triwulan I sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KU.001/1/5/SKJ/2025 tentang dukungan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang mana perlu dilakukan penundaan sementara untuk proses perikatan atau kontrak barang/jasa terutama dari jenis belanja barang dan belanja modal sehingga untuk kegiatan kontraktual penyusunan Kajian NSPK belum bisa dilaksanakan, selain itu pada Tahun Anggaran 2025 dan Penghematan Anggaran sebesar 50% untuk anggaran Perjalanan Dinas sesuai dengan Penetapan DIPA TA 2025 pada tanggal 2 Desember 2025.

2.6. 5. Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut:



- a. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian aktivitas/startegi adalah:
 1. Penyelesaian NSPK pada tahun 2025 untuk NSPK yang masih berproses penyusunan di tahun 2024.
 2. Akan dilakukan penetapan proses bisnis dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian perlu dilakukan penyusunan SOP Makro dan SOP Mikro Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
 3. Evaluasi Perjanjian Kinerja serta rencana aksi atas perjanjian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025
- b. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian Anggaran dengan melakukan penyesuaian rencana penyerapan anggaran pada kegiatan pendukung Indikator Kinerja.

2.7. 1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 pada Indikator kinerja kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian target kinerja sebesar 83,200 atau kategori A. fokus pemenuhan pada komponen perencanaan Sub Komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) dengan nilai BB.

Penetapan target kinerja berdasarkan konsep rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025 – 2029 dan Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tertuang di Laporan Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2024.

2.7. 2. Analisis Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan I tahun 2025, realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



(AKIP) belum bisa ada hasil pengukuran kinerja sesuai dengan penetapan rencana aksi kinerja tahun 2025 Nilai AKIP akan di targetkan pada Triwulan ke 4 Tahun 2025.

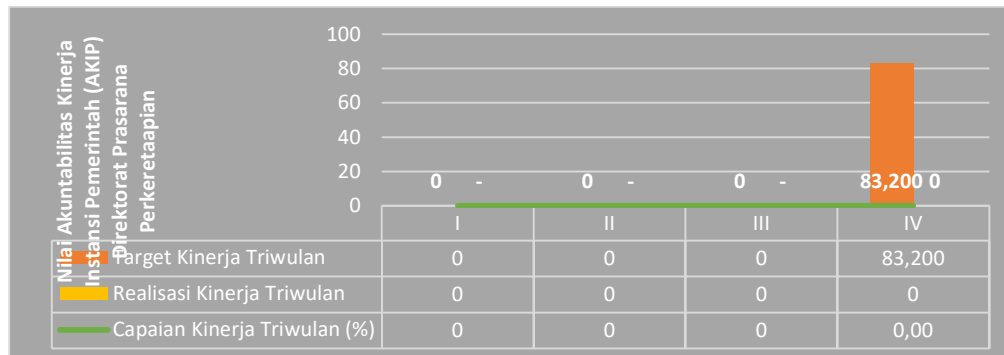
Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 18

Perbandingan capaian kinerja per triwulan
Indikator kinerja kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83.200	-	-	-	83.200	-	-	-	-	-	-	-	-

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar II.13

Grafik Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian per triwulan

Sesuai dengan penetapan kegiatan pendukung tahun anggaran 2024 Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan kegiatan yang menjadi pendukung Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian yaitu:

1. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja berupa kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Penyusunan, Pelaporan Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian TA 2023



2. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran berupa kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029
3. Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Perkeretaapian berupa kegiatan Rapat Evaluasi Hasil Kinerja Satker Prasarana Bersama Direktorat

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai kegiatan pendukung tahun anggaran 2025 Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan anggaran sebesar Rp. 970.144.000,00 sesuai dengan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 serta berdasarkan petikan DIPA TA 2025 Nomor : SP DIPA-22.08.1.467484 Revisi Ke 2 tanggal 21 Februari 2025 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : 0085/K3/II/2025 perihal Penyampaian Rincian Penghematan Efisiensi Belanja di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian TA 2025, sisa anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 205.080.000,00. Sampai dengan periode triwulan 1 tahun 2025 untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SAKIP dilakukan dengan metode daring/zoom dan rapat offline sesuai ketersediaan ruang rapat.

Detail pencapaian kegiatan pendukung kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana yang menjadi indikator kinerja berjenjang sebagaimana dijelaskan pada lampiran 3 Laporan Monitoring Kinerja periode triwulan I Tahun 2025 serta sumber data dukung kinerja sebagaimana lampiran 4 pelaporan kinerja berjenjang periode triwulan I tahun 2025.

2.7. 3. Analisis Keberhasilan dalam Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian didukung beberapa langkah-langkah telah dilakukan telah dilakukan yaitu penetapan target tahun 2025 dan rencana aksi tahun 2025.



Sebagai tindaklanjut pengukuran kinerja dan laporan kinerja triwulan IV tahun 2024/Laporan Kinerja Tahun 2024 Telah dilakukan **penyesuaian aktivitas/strategi** yaitu telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Periode Tahun 2025 dan telah dilakukan penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025, sebagai tindaklanjut penetapan dokumen Penetapan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja telah dilakukan publikasi melalui aplikasi *e-SAKIP Reviu* Menpan RB dan Website DJKA. Selain itu, penyesuaian aktivitas pada triwulan I tahun 2025 telah dilaksanakan pembahasan penyusunan *cascading* Indikator Kinerja Berjenjang untuk Indikator Kinerja Individu (IKI) dari Level Eselon III sampai dengan Jabatan Fungsional Tertentu/Umum. Dan sebagai tindaklanjut dari evaluasi AKIP Tahun 2025 Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah melaksanakan semua rekomendasi dari Inspektorat Jenderal dan pelaporan melalui Nota Dinas Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : 0145/K3/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025.

Penerapan inovasi kinerja dan perubahan budaya kinerja tahun 2025 untuk mendukung Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah dilaksanakan pembahasan secara berkala Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Bulanan dengan para penanggungjawab kinerja dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana kebijakan Direktur Prasarana Perkeretaapian melalui Nota Dinas : 0800/K3/I/2025 tanggal 29 Januari 2025. Penerapan inovasi kinerja dan budaya kinerja memberikan dampak positif, hal ini dapat dibuktikan dengan dari hasil evaluasi kepatuhan pelaporan yang dilaksanakan oleh Setditjen Perkeretaapian, Direktorat Prasarana meraih urutan pertama tingkat kepatuhan unit kerja dalam pelaporan kinerja.

Pelaksanaan **Crosscutting** kinerja belum ada pelaksanaan dikarenakan penilaian AKIP secara berjenjang belum dilaksanakan baik di tingkat mandiri, tingkat Ditjen Perkeretaapian maupun tingkat Kementerian.

Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja tahun 2024, sebagaimana dijelaskan pada Bab III Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan pada tahun 2024 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.



2.7. 4. Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan IV tahun 2024 indikator kinerja kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat kendala dan perlu dilakukan penanganan sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Beberapa kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2025 sebagian besar anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian masuk dalam kebijakan efisiensi, sehingga kegiatan-kegiatan belum bisa dilaksanakan serta rencana penyerapan anggaran sebagaimana ditetapkan didalam Rencana Aksi Atas Kinerja tidak tepat sesuai target.
- b. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Rencana Startegis Direktorat Prasarana Perkeretaapian belum ada penetapan dikarenakan belum adanya penetapan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Rencana Startegis Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode 2025-2029

2.7. 5. Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut:

- a. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian Anggaran akan dilakukan evaluasi rencana penyerapan anggaran Dirktorat Prasarana Perkeretaapian TA 2025 sesuai dengan penetapan Efisiensi TA 2025.
- b. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian Kebijakan akan dilakukan Koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian dan Penyelesaian penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029;



c. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian aktivitas/Strategi adalah:

1. Akan dilakukan persiapan evaluasi AKIP Tahun 2025
2. Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025
3. Sosialisasi Penerapan SOP Bidang SAKIP diilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

2.7. 6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (Benchmarking Kinerja)

Dari hasil perbandingan realisasi Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Level Nasional) diketahui bahwa kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian turut berkontribusi dalam dalam pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Perkeretaapian pada penilaian AKIP Tahun 2024, dengan perbandingan (benchmarking) kinerja terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel II.19
Benchmarking Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Direktorat Prasarana Perkeretaapian

UNIT KERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	84	82,10	97,74
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,00	82,95	99,94

Sumber data : Laporan Kinerja Setditjen Perkeretaapian, Surat Inspektur Jenderal Nomor : PS.302/6/25/ITJEN/2024 dan hasil evaluasi AKIP melalui Dashboard Aplikasi Silaki DJKA

Benchmark Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian menggunakan data capaian kinerja tahun 2024 dikarenakan penilaian AKIP Tahun 2025 belum dilaksanakan.

2.8. 1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian



Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 pada Indikator kinerja kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan target sebesar 15 (terdefinisi) Penetapan target kinerja berdasarkan konsep rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025 – 2029 dan penentuan Baseline minimal target yang ditentukan unti kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Penilaian Penerapan Manajemen Risiko Level 0- 30 mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

2.8. 2. Analisis Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan I tahun 2025, realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian belum ada hasil pengukuran kinerja sesuai dengan penetapan rencana aksi kinerja tahun 2025 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian akan di targetkan di periode triwulan IV tahun 2025.

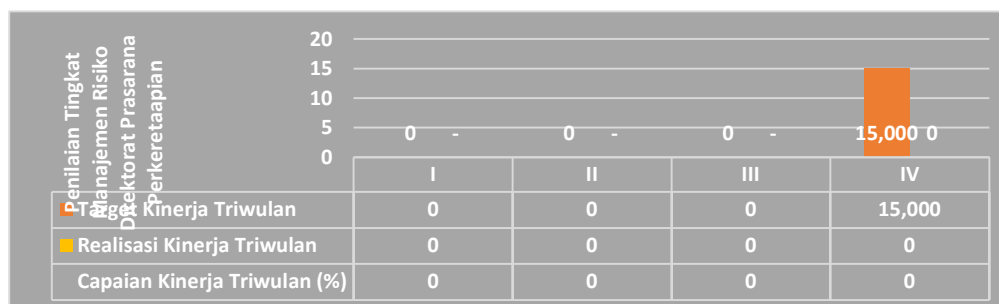
Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 20

Perbandingan capaian kinerja per triwulan
Indikator kinerja kegiatan Tingkat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan pada indikator Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

**Gambar II. 14**

Grafik Capaian Kinerja Tingkat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

2.8. 3. Analisis Keberhasilan dalam Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian didukung beberapa langkah-langkah telah dilakukan telah dilakukan yaitu penetapan target tahun 2025 dan rencana aksi tahun 2025. Pada awal tahun 2025 periode bulan Januari berdasarkan surat Inspektur Jenderal Nomor : PS.302/1/13/ITJEN/2025 tanggal 21 Januari 2025 telah dilakukan Wawancara penilaian manajemen risiko dan penyampaian data dukung penyelenggaraan manajemen risiko dalam rangka Penilaian tingkat penerapan Manajemen Risiko dalam mendukung pelaksanaan pengawasan internal berbasis risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, namun sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 belum ada hasil penilaian penerapan manajemen risiko dari inspektorat jenderal.

Sampai dengan periode triwulan I tahun 2025, dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah melaksanakan tahapan-tahapan diantaranya sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan pembahasan Komunikasi dan Konsultasi/pembahasan Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Risiko dan Penyusunan Laporan Triwulan IV serta Laporan Tahunan Manajemen Risiko Tahun 2024 pada tanggal 9 s.d 10 Januari 2025, dan telah di pelaporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui surat pemilik risiko nomor : UM.0066/1/5/K3/DJKA/2025 tanggal 10 Januari 2025 Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode Triwulan IV Tahun 2024 dan Periode Tahunan Tahun



- 2024 serta laporan Unit Manajemen Risiko Triwulan IV Nomor : UM.006/1/1/K3.2/DJKA/2025 tanggal 10 Januari 2025 dan Laporan Periode Tahun 2024 Unit Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian nomor : UM.006/1/2/K3.2/DJKA/2025 tanggal 10 Januari 2025
2. Penetapan Selera risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui Nota Dinas Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor 0072/K3/I/2025
 3. Telah ditetapkan dokumen Piagam Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025 dan penandatanganan Piagam Manajemen Risiko unit kerja Dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 14 Januari 2025
 4. Telah dikomunikasikan kepada seluruh pengelola risiko perihal rencana penanganan risiko melalui Nota Dinas Pemilik Risiko Nomor : 0071/K3/II/2025 agar para pengelola risiko melaksanakan kegiatan penanganan risiko tahun 2025
- Pelaksanaan **Crosscutting** kinerja dengan pelaksanaan penilaian manajemen risiko oleh Inspektorat Jenderal.

2.8. 4. Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan I tahun 2025 indikator kinerja kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat kendala dan perlu dilakukan penanganan sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi. Kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah belum bisa dilakukan input dokumen manajemen risiko pada aplikasi SIMARKO untuk menunjang pelaksanaan Manajemen Risiko pada tahun 2025 dan keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2025..

2.8. 5. Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut:



- a. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian Anggaran yaitu akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian rencana penarikan anggaran TA 2025 pada kegiatan pendukung Indikator Kinerja.
- b. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian aktivitas/Strategi adalah:
 1. Penggunaan Aplikasi Mr. Bean (MR DJKA) dan Ms. Office Excel untuk pemantauan penanganan risiko periode Triwulan I Tahun 2025.
 2. Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi untuk kegiatan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan penyusunan laporan manajemen risiko periode triwulan I Tahun 2025;

2.8. 6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (Benchmarking Kinerja)

Benchmark Kinerja pada Indikator Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan level Direktorat Jenderal Perkeretaapian belum bisa disajikan data kinerja capaian kinerja dikarenakan belum adanya hasil penilaian Tahun 2025

2.9. 1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 pada Indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian target kinerja sebesar 85,76%.

Penetapan target kinerja berdasarkan konsep rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025 – 2029 dengan formulasi perhitungan mengacu kepada PMK 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu (Aplikasi SMART Kemenkeu).



2.9.2. Analisis Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan I tahun 2025, didapatkan hasil realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 50 berdasarkan pada aplikasi SMART periode bulan Maret 2025, dengan formulasi sebagai berikut :

Nilai Kinerja Anggaran = 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran + 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (NKA)

Terdiri dari:

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

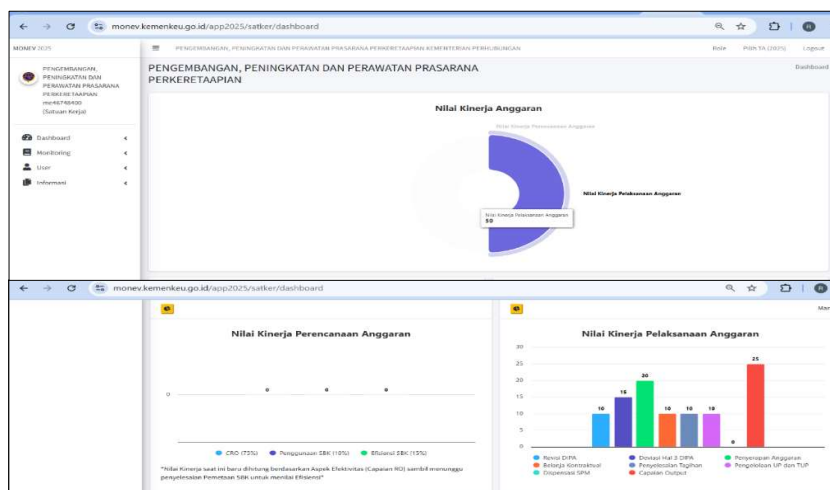
1. Efektivitas Capaian RO sebesar 75%
2. Efisiensi :
 - a. Penggunaan SBK sebesar 10%
 - b. Efisiensi SBK sebesar 15%

+

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

1. Kualitas Perencanaan Anggaran :
 - a. Revisi DIPA sebesar 10%
 - b. Deviasi Hal III DIPA sebesar 15%
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran :
 - b. Penyerapan Anggaran sebesar 20%
 - c. Belanja Nomenklatur sebesar 10%
 - d. Penyelesaian Tagihan sebesar 10%
 - e. Pengelolaan UP dan TUP sebesar 10%
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Capaian output sebesar 25%
4. Dispensasi SPM (Pengurangan)

Sehingga capaian kinerja berdasarkan aplikasi SMART sebagai berikut :



Gambar. II.15

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui aplikasi SMART Kemenkeu



Atau dengan perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Kinerja}}{\text{Anggaran (NKA)}} = 0\% + 50\% = 50\%$$

Perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja triwulan I dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja periode triwulan I sebesar 50,000% dengan target kinerja triwulan I tahun 2024 sebesar 45,817% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja triwulan sebesar 109,130% atau realisasi capaian kinerja melebihi target kinerja triwulan I yang telah ditetapkan didalam revisi rencana aksi tahun 2025 namun masih *on the right track*.

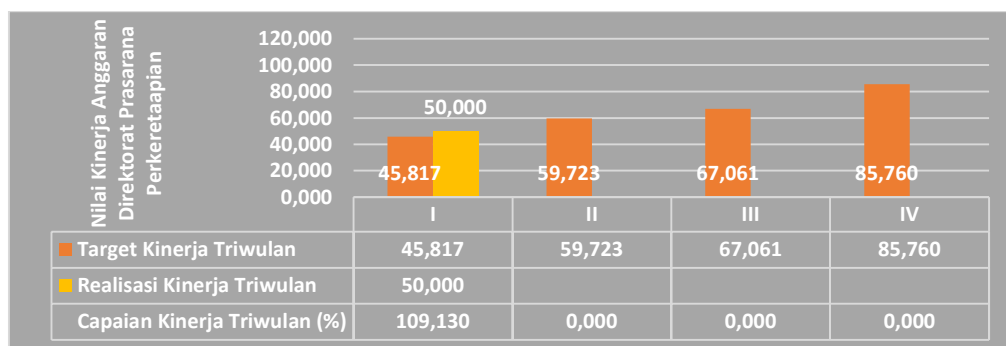
Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan I sebesar 50,000% dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 85,760% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 58,302%. Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.21

Perbandingan capaian kinerja per triwulan
Indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85.760	45.817	59.723	67.061	85.760	50.000				109.130	0.000	0.000	0.000

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan pada indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar II.16

Diagram perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian



Sesuai dengan penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2025 berdasarkan penetapan DIPA / POK pagu anggaran awal sebesar Rp. 508.529.626.000,00.

Untuk perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran dengan Rencana Penarikan Anggaran pada Maret 2024 menggunakan Revisi DIPA/POK ke 4 Tahun 2025 dengan Realisasi Penyerapan sebesar Rp 4.5277.701.632,- dengan persentase penyerapan sebesar 0,890%.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KU.001/1/5/SKJ/2025 tentang dukungan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang mana perlu dilakukan penundaan sementara untuk proses perikatan atau kontrak barang/jasa terutama dari jenis belanja barang dan belanja modal dan Penetapan DIPA/POK Revisi 2 pada bulan Februari, Revisi 3 pada bulan Maret serta Revisi 4 pada bulan Maret anggaran Direktorat Prasarana perkeretaapian yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp. 396.704.2992.000,00

Detail pencapaian kegiatan pendukung kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana yang menjadi indikator kinerja berjenjang sebagaimana dijelaskan pada lampiran 3 Laporan Monitoring Kinerja periode triwulan I Tahun 2025 serta sumber data dukung kinerja sebagaimana lampiran 4 pelaporankinerja berjenjang periode triwulan I tahun 2025.

2.9.3. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian didukung beberapa langkah-langkah telah dilakukan yaitu penetapan target tahun 2025 dan rencana aksi tahun 2025.

Telah dilakukan **penyesuaian aktivitas/strategi** dengan penetapan struktur pengelola anggaran TA 2025 dengan penetapan Surat Keputusan Nomor : SK-SPPPPKA 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas/ Tanggung Jawab Pelaksana Pengelola Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Pada



Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan Dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025, Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana ditetapkan dalam rencana aksi atas kinerja tahun 2025, selain itu pada periode triwulan I telah dilakukan Revisi Hal. III DIPA TA 2025. Untuk **penyesuaian anggaran/startegi** telah diusulkan buka/blokir anggaran TA 2025 untuk kegiatan Jasa Konsultansi IMO serta penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) TA 2025 setelah penetapan Efisiensi dengan target penyerapan anggaran sampai akhir tahun sebesar Rp. 118.825.344.000,00. (21,98%) dari pagu sebesar Rp. 508.529.626.000,00 dengan total blokir sebesar Rp. 396.704.292.000,00. Sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja dan formulasi indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah dilakukan **penyesuaian aktiivtas** berupa secara konsisten dan tepat waktu update pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI periode bulan Januari s.d Maret 2025 serta perolehan nilai pelaksanaan anggaran periode triwulan 1 tahun 2025 sebesar 50 dengan rincian sebagai berikut :

Gambar II.17

Secreenshot Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran periode bulan Maret 2025 (aplikasi SMART)

2.9.4. Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan I tahun 2024 indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana terdapat kendala dan perlu dilakukan penanganan sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.



Kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian yaitu

1. Pada aplikasi SMART Kemenkeu “Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi;
2. Belum sesuai Rencana Penarikan Anggaran yang tertuang di penetapan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan penetapan efisiensi anggaran TA 2025;
3. Belum adanya kegiatan kontraktual TA 2025.

2.9. 5. Upaya Peningkatan Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana sebagai berikut :

- a. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian aktivitas/Strategi adalah:
 1. Evaluasi Perjanjian kinerja serta Penyusun penyesuaian Rencana Aksi Tahun 2025 untuk penyerapan anggaran berdasarkan anggaran yang tidak diblokir; dan
 2. Revisi Hal. III DIPA TA 2025
 3. Pengisian komponen Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Aplikasi SAKTI .

2.9. 6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (Benchmarking Kinerja)

Dari hasil perbandingan realisasi indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Level Nasional) diketahui bahwa perbandingan (*benchmarking*) kinerja terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel II.22

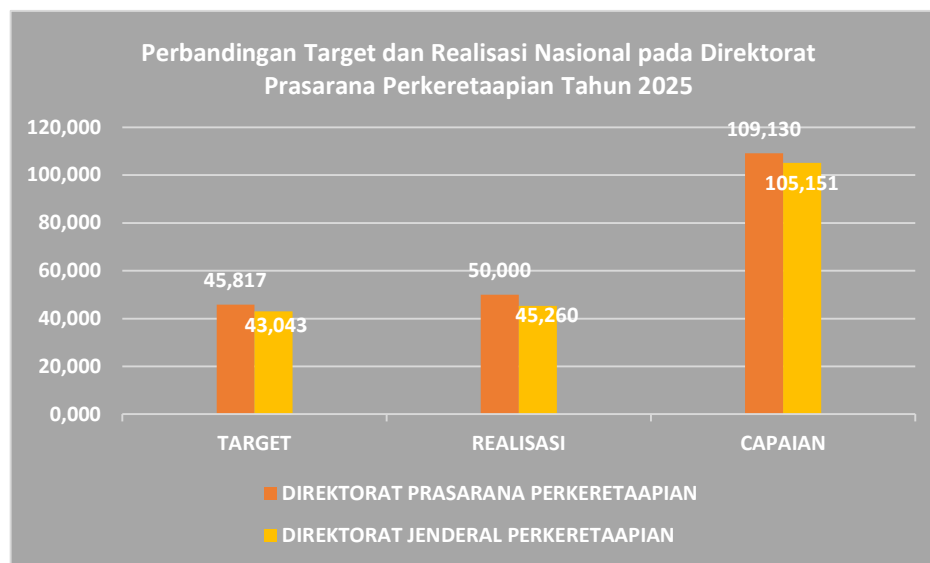
Benchmarking Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Pelaksanaan Anggaran



UNIT KERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	45,817	50,000	109,130
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	-	Nilai	43,043	45,260	100,150

Sumber Data : Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Dashboard Aplikasi SMART DJKA

Untuk diagram perbandingan benchmarking Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar II. 18

Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Nasional pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian

2.10. 1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 pada indikator target pada Indikator Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian target kinerja yaitu sebesar 100%. Dengan potensi PNBP sebagaimana penetapan DIPA TA 2025 berdasarkan sebesar Rp. 908.250.000, yang terdiri dari :

1. Akun 425519 pendapatan Jasa Transportasi Lainnya sebesar Rp 879.500.000,-



2. Akun 425287 pendapatan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi dibidang Perhubungan sebesar Rp. 28.750.000,00.

Penetapan target kinerja berdasarkan konsep rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025 – 2029 dan Potensi PNBPN Tahun 2025.

2.10.2. Analisis Capaian Kinerja Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja periode I tahun 2025, Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 178,00% atau penerimaan sampai dengan Maret 2025 sebesar Rp. 1.616.721.448,00

Untuk pengukuran kinerja dengan formulasi perhitungan kinerja sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBPN bidang Prasarana Perkeretaapian}}{\text{Target PNBPN bidang Prasarana Perkeretaapian}} \times 100\%$$

Sehingga Perhitungan Capaian Kinerja Sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Realisasi PNBPN} &= \frac{1.616.721.448}{908.250.000} \times 100\% \\ &= 178,00\% \end{aligned}$$

Perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja triwulan I dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja periode triwulan I sebesar 178,00% dengan target kinerja triwulan I tahun 2025 sebesar 12,029% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja triwulan I sebesar 1.479,757% atau realisasi capaian kinerja triwulan I, tidak *on the right track*.

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan I sebesar 178,00% dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 100% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 178% (tidak *on the right track*).

Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.23

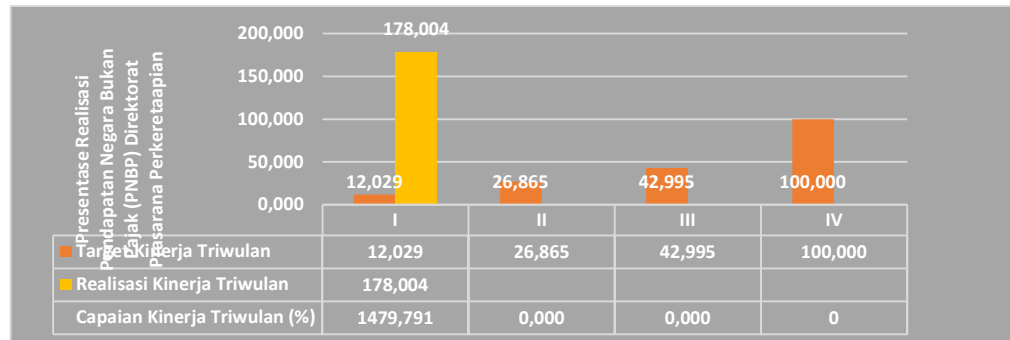
Perbandingan capaian kinerja per triwulan Indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV



Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100.000	12.029	26.865	42.995	100.000	178.004				1479.791	0.000	0.000	0
---	---	---------	--------	--------	--------	---------	---------	--	--	--	----------	-------	-------	---

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja pertriwulan dan tahunan pada indikator Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar II.19

Diagram perbandingan Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

2.10. 3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Persentase Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian didukung langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu **penyesuaian aktivitas/strategi** yaitu dilakukan penagihan kepada pemohon terkait PNBP Pelayanan Penetapan Perizinan dan pelayanan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan sampai triwulan 1 (31 Maret 2025) untuk PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp. 1.616.721.448,00 dengan rincian perjenis akun sebagai berikut :

1. Akun 425287 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan sebesar Rp. 26.650.000,00
2. Akun 425519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya sebesar Rp. 1.326.000.000,00
3. Akun 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp. 33.426.323,00



4. Akun 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 151.978.275,00
5. Akun 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 68.016.649,00
6. Akun 411618 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit sebesar 10.650.161,00

Selain itu keberhasilan capaian kinerja didukung penyelesaian perizinan perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain, perizinan pembangunan prasarana perkeretaapian umum dan sertifikasi prasarana perkeretaapian

1. Pelayanan Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain sebanyak 11 Penetapan perizinan;
2. Pelayanan sertifikasi prasarana perkeretaapian sebanyak 22 penetapan sertifikasi.

Untuk Analisa kegagalan terdapat Potensi Penerimaan PNBPN yang tidak masuk didalam penetapan rencana aksi atas perjanjian kinerja sehingga kinerja diatas - target kinerja diantaranya pada akun Pennerimaan Kembali Belanja Barang dan Modal TA yang lalu, Pendapatan Pajak Tidak langsung Lainnya Deposit serta kesesuaian penetapan target PNBPN pada DIPA TA. 2025 dengan Potensi PNBPN Tahun 2025.

2.10. 4. Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan I tahun 2024 indikator kinerja kegiatan Perolehan Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian terdapat kendala Potensi Penerimaan PNBPN yang tidak masuk didalam penetapan rencana aksi atas perjanjian kinerja sehingga kinerja diatas - target kinerja diantaranya pada akun Pennerimaan Kembali Belanja Barang dan Modal TA yang lalu, Pendapatan Pajak Tidak langsung Lainnya Deposit serta kesesuaian penetapan target PNBPN pada DIPA TA. 2025 dengan Potensi PNBPN Tahun 2025.

2.10. 5. Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau



rekomendasi peningkatan kinerja. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian sebagai berikut:

Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian aktivitas adalah:

1. Penagihan kepada pemohon terkait dengan penetapan perizinan dibidang prasarana perkeretaapian;
2. Evaluasi Perhitungan target PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025 serta evaluasi rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025; dan
3. Untuk inovasi pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian yaitu akan dilakukan penerapan sertifikasi berbasis teknologi pada Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2024 sehingga akan mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian.

2.10. 6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (Benchmarking Kinerja)

Dari hasil perbandingan realisasi indikator kinerja kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian dengan realisasi kinerja PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Level Nasional) diketahui bahwa kinerja PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian berkontribusi dalam PNBP direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 0,754% dengan perbandingan (benchmarking) kinerja terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel II.24
Benchmarking Kinerja Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

UNIT KERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	908.250.000	1.616.721.448	178
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	-	%	1.246.326.325.000	689.126.836.258	55,29

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Per Eselon I dan Laporan PNBP Direktorat Prasarana Periode Bulan Maret 2025

2.11. 1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian



Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 pada Indikator kinerja kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan target sebesar 79,000.

Penetapan target kinerja berdasarkan konsep rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025 – 2029 dan penentuan Baseline minimal target yang ditentukan unti kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian diperoleh dari hasil penilaian dari Unit Kearsipan I Kementerian Perhubungan pada waktu berjalan (periode tahunan) berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI nomor 165 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan tata cara penilaian pengawasan kearsipan.

2.11. 2. Analisis Capaian Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan I tahun 2025, realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian belum ada hasil pengukuran kinerja sesuai dengan penetapan rencana aksi kinerja tahun 2025 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian akan di targetkan di periode triwulan IV tahun 2025.

Formulasi penilaian pengawasan kearsipan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Pengawasan Kearsipan Internal} = \frac{\text{Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis} + \text{Aspek Sumber Daya}}{\text{ditpraska} \quad \text{Kearsipan}}$$

Untuk pengukuran kinerja belum bisa dilakukan menunggu penilaian kearsipan tahun 2025 sesuai ketentuan

Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

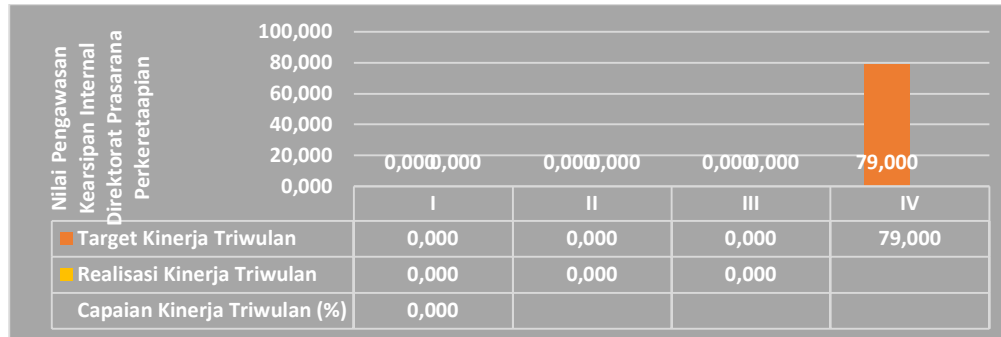
Tabel II. 25

Perbandingan capaian kinerja per triwulan
Indikator kinerja kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	79.000	-	-	-	79.000	-	-	-		-	-	-	0



Untuk diagram perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan pada indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar II. 20

Grafik Capaian Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

2.11. 3. Analisis Keberhasilan dalam Capaian Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian didukung beberapa langkah-langkah telah dilakukan yaitu penetapan target tahun 2025 dan rencana aksi tahun 2025.

Sampai dengan periode triwulan I tahun 2025, dalam penyelenggaraan kegiatan kearsipan Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah melaksanakan tahapan-tahapan diantaranya sebagai berikut :

1. Telah ditetapkan Surat Keputusan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor: SK-K3DJKA 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Arsip Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
2. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tim pengelola arsip dengan pembahasan penataan dan pengelolaan arsip dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
3. Telah dilakukan persiapan penerapan aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dengan tahapan registrasi akun admin dan pengguna (pegawai) dan telah elah dilaksankan Sosialisasi lanjutan terkait aplikasi SRIKANDI di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
4. Telah dilaksanakan terintegrasi penyelenggaraan kegiatan kearsipan dengan penyeleggaraan manajemen risiko dengan tahapan yang sudah dilaksanakan



Identifikasi Risiko dan Penyusunan Rencana Penanganan Risiko pada Proses Bisnis Kearsipn dan serta pelaksanaan kegiatan penanganan risiko pada periode triwulan I tahun 2025

Pelaksanaan **Crosscutting** kinerja dengan pelaksanaan penilaian pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretapiian oleh Biro Umuml.

2.11. 4. Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan I tahun 2025 indikator kinerja kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana terdapat kendala dan perlu dilakukan penanganan sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah belum bisa dilakukan revisi anggaran untuk indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana

2.11. 5. Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana sebagai berikut:

- c. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian Anggaran yaitu akan pengoptimalan anggaran yang tersedia untuk kegiatan penyelenggaraan Kearsipan Direktorat Prasarana Perkeretapiian.
- d. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian aktivitas/Strategi adalah:
 1. Akan dilakukan monitoring pengawasan tata naskah dinas dan pemberkasan arsip aktif, penyimpanan arsip dan pembenahan arsip tidak tertata
 2. Untuk Perubahan Budaya Kinerja akan dilakukan Penyesuaian penggunaan aplikasi SRIKANDI dan pembahasan tata cara pemberkasan arsip pada aplikasi SRIKANDI



3. Akan dilaksanakan lanjutan Penataan Arsip LRT Jabodebek Tahap III dan pemindahan Arsip LRT Jabodebek Tahap Ke IV
4. Akan dilakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Kearsipan yang akan dilaksanakan secara online dengan materi penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

2.11. 6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (Benchmarking Kinerja)

Benchmark Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan level Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan perbandingan (benchmarking) kinerja terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II. 26
Benchmarking Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan

UNIT KERJA	NILAI
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	79,56 (BB) Sangat Baik
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	82,24 (A) Memuaskan

Sumber data : Laporan LAKI Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2024



II.3. CAPAIAN LAINNYA

Pada Tahun 2025 Periode Triwulan I terdapat capaian lainnya yang diterima oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah peringkat III Dalam Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 dan peringkat I Kepatuhan Pelaporan Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



Gambar II.21

Piagam Perhargaan Peringkat III Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

No	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Tahun 2024		
		Pemenuhan Laporan Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja**	Rata-Rata Kepatuhan
1	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	97,92	100,00	98,96
2	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	94,17	100,00	97,09
3	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	94,17	98,00	96,09
4	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	90,00	100,00	95,00
5	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	86,25	100,00	93,13
6	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	88,33	92,67	90,50
7	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	80,42	100,00	90,21
8	Balai Pengujian Perkeretaapian	94,17	86,00	90,09
9	Direktorat Sarana Perkeretaapian	86,25	88,00	87,13
10	Balai Perawatan Perkeretaapian	72,92	98,00	85,46
11	Direktorat LLAKA	86,25	78,00	82,13
12	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	80,42	81,33	80,88
13	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	78,33	81,33	79,83
14	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	46,67	54,00	50,34
15	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel	..*	78,67	39,34

Gambar II.22

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR.205/1/10/KI/DJKA/2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Evaluasi Kinerja Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024



II.4. REALISASI ANGGARAN

II.4.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan DIPA serta POK awal dengan pagu sebesar Rp. 508.529.636.000,00 (*Lima Ratus Delapan Miliar Limaratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Realisasi anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian s.d Triwulan I (Bulan Maret 2025) sebesar Rp4.527.701.632,00 atau sebesar 8,903% dan Realisasi fisik sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar 31,25% dengan rincian realisasi per triwulan sebagai berikut:

Tabel II.26

Realisasi Anggaran Unit Kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian TA. 2024 periode Triwulan IV

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%		SISA DANA
				KEU	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7
1	BELANJA PEGAWAI	-	-	-	-	
2	BELANJA BARANG	44,086,820,000	4,527,701,632	0.890	0.313	39,559,118,368
3	BELANJA MODAL	464,442,816,000	0	0.000	0.0	464,442,816,000
	- RUPIAH MURNI	310,686,409,000	0	0.000	0.0	310,686,409,000
	- PHLN	153,756,407,000	0	0.000	0.0	153,756,407,000
	JUMLAH	508,529,636,000	4,527,701,632	0.890	0.313	504,001,934,368



II.4.2 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA

Tabel II.27
Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu	Realisasi Anggaran	%	Sisa Anggaran	%
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Prasarana	Rp372.536.425.000,00	Rp1.456.860.000,00	0,391	Rp371.079.565.000,00	99,609
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	Rp3.017.854.000,00	Rp16.864.198,00	0,559	Rp3.000.989.802,00	99,441
		Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal	Rp94.164.676.000,00	Rp7.753.566,00	0,008	Rp94.156.922.434,00	99,992
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	0,00	0,00	0,000	Rp0,00	0,000
3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Rp4.528.574.000,00	Rp13.774.620,00	0,304	Rp4.514.799.380,00	99,696
		Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	Rp1.953.638.000,00	Rp0,00	0,000	Rp1.953.638.000,00	100,000
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Rp970.144.000,00	Rp1.260.000,00	0,130	Rp968.884.000,00	99,870
		Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Rp230.000.000,00	Rp0,00	0,000	Rp230.000.000,00	100,000



No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu	Realisasi Anggaran	%	Sisa Anggaran	%
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Rp31.128.325.000,00	Rp3.031.189.248,00	9,738	Rp28.097.135.752,00	90,262
		Presentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Rp0,00	Rp0,00	0,000	Rp0,00	0,000
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Rp0,00	Rp0,00	0,000	Rp0,00	0,000



II.5. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Dalam laporan monitoring kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode triwulan I tahun 2025 telah dilakukan pengukuran terkait dengan efisiensi sumber daya. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan dengan pengukuran terhadap efisiensi anggaran dan efisiensi Sumber daya Manusia sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

II.5.1 Analisis Efisiensi RO Satker

Dalam proses pelaksanaan kegiatan periode Triwulan I Tahun 2025, sesuai dengan perhitungan efisiensi mengacu kepada peraturan menteri keuangan nomor: 22/PMK.02/2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dengan rincian perhitungan sebagai berikut:



Tabel II.28
Efisiensi Anggaran Per Masing-Masing Indikator Periode I Tahun 2025

RO	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	3%	IDR 93,279,566,000.00	IDR 0.00	IDR 2,798,386,980.00	IDR 2,798,386,980.00
Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	4%	IDR 2,430,411,000.00	IDR 0.00	IDR 97,216,440.00	IDR 97,216,440.00
Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design)	2%	IDR 16,679,031,000.00	IDR 0.00	IDR 333,580,620.00	IDR 333,580,620.00
Jalur Kereta Api	2%	IDR 295,007,378,000.00	IDR 0.00	IDR 5,900,147,560.00	IDR 5,900,147,560.00
Infrastruktur Perkeretaapian	98.89%	IDR 1,473,175,000.00	IDR 1,456,860,000.00	IDR 1,456,822,757.50	(IDR 37,242.50)
Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I	3%	IDR 100,000,000.00	IDR 0.00	IDR 3,000,000.00	IDR 3,000,000.00
Surabaya Regional Railway Line (Phase I)	3%	IDR 60,376,841,000.00	IDR 0.00	IDR 1,811,305,230.00	IDR 1,811,305,230.00
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	24.99%	IDR 12,405,200,000.00	IDR 237,336,837.00	IDR 3,100,059,480.00	IDR 2,862,722,643.00
Layanan Perkantoran	24.99%	IDR 17,805,733,000.00	IDR 2,792,332,411.00	IDR 4,449,652,676.70	IDR 1,657,320,265.70
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3%	IDR 2,898,314,000.00	IDR 0.00	IDR 86,949,420.00	IDR 86,949,420.00
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4%	IDR 5,156,595,000.00	IDR 39,652,384.00	IDR 206,263,800.00	IDR 166,611,416.00
Layanan Manajemen Keuangan	3%	IDR 917,392,000.00	IDR 1,520,000.00	IDR 27,521,760.00	IDR 26,001,760.00
Jumlah		IDR 508,529,636,000.00	IDR 4,527,701,632.00	IDR 20,270,906,724.20	IDR 15,743,205,092.20
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum(Alokasi\ Anggaran\ RO \times Capaian\ RO) - Realisasi\ Anggaran\ RO}{\sum(Alokasi\ Anggaran\ RO)} \times 100\%$				3.096%	



II.5.2 Analisis Sumber Daya Manusia

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Salah satu upaya Direktorat Prasarana Perkeretaapian dalam mendukung reformasi birokrasi dengan melakukan efisiensi sumber daya manusia yang semakin berkualitas.

Analisis Efisiensi SDM dapat dirancang dengan mengukur seberapa optimal SDM yang tersedia mampu menghasilkan output yang sesuai atau melebihi standar kinerja yang ditetapkan. Dengan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi SDM} = \left(\frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} \times \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Target Output}} \right) \times 100\%$$

Sehingga untuk perhitungan Efisiensi Sumber Daya Manusia Direktorat Prasarana Perkeretaapian didapatkan hasil sebagai berikut :

1. SDM Yang tersedia : 175
2. Kebutuhan SDM Sesuai ABK : 355
3. Output Aktual : 100
4. Target Output : 100

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi SDM} &= ((175/355) \times (100/100)) \times 100\% \\ &= 49,296\%\end{aligned}$$

Nilai Efisiensi SDM Direktorat Prasarana sebesar 49,296% dengan Output Aktual per Target Output sebesar 100%



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BAB III

PENUTUP



BAB III PENUTUP

III.1. TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Sebagaimana telah disusun langkah-langkah guna peningkatan pencapaian kinerja di periode sebelumnya (triwulan IV tahun 2024), telah dilaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi peningkatan kinerja Triwulan I tahun 2025 (periode sebelumnya) sebagaimana dijelaskan pada Laporan Monitoring Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel III. I

Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	IKK. Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api Antar Wilayah	a. Perlu dilakukan evaluasi indikator kinerja kegiatan untuk periode Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode tahun 2025-2029	a. Evaluasi serta penyusunan indikator kinerja kegiatan melalui konsep Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029 dan telah ditetapkan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis bidang Prasarana Perkeretaapian melalui perjanjian kinerja
2.	IKK. Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	a. Penyusunan Target Pengawasan Tahun 2025; b. Perlu dilakukan pembahasan hasil pengukuran Track Geometry Trolley di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan; c. Perlu dilakukan pembahasan lanjutan	a. Telah disusun Dilakukan penyusunan Rencana Aksi 2025 Bidang Jalur dan Bangunan Kereta Api b. Telah disampaikan Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor: KA.008/2/11/K3/DJKA/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Persetujuan Rute dan Jadwal Pengukuran Indeks Kualitas Jalan Rel Tahun 2025;



No	Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		standar TQI dan FGD dengan operator-operator di Indonesia untuk penyusunan Standar TQI; d. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta permintaan laporan hasil pengukuran TQI periode 4 tahun 2024; e. Perlu dilakukan koordinasi terkait jadwal pengukuran TQI tahun 2025.	c. Pembahasan direncanakan akan dilakukan pada TW II 2025 d. Telah dilaksanakan kegiatan evaluasi pengukuran indeks kualitas jalan rel dengan KA Ukur sesuai dengan surat undangan direktur prasarana perkeretaapian nomor : UM.207/1/22/K3/DJKA/2024 tanggal 23 Januari 2025, dengan hasil: a. Laporan Hasil Pengukuran Triwulan IV Tahun 2024 yang disampaikan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) masih terdapat perbedaan panjang terukur dan ditemukeni terdapat perbedaan data Triwulan III dengan Triwulan IV. PT KAI (Persero) perlu menyampaikan Justifikasi Teknis yang menjelaskan perbedaan panjang terukur dan perbedaan data hasil pengukuran pada Tahun 2024; b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam hal ini Daop dan Divre perlu melakukan sinkronisasi program kegiatan pada Tahun 2025 dengan Balai Teknik Perkeretaapian dalam rangka menjaga kehandalan prasarana Perkeretaapian yang dibuktikan dengan peningkatan persentase Nilai TQI pada Kategori I dan II; c. PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat berkoordinasi dengan PPK IMO



No	Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian terkait kegiatan Perawatan Berkala, Pengambalian Fungsi dan Penanganan daerah rawan yang harus segera dilakukan penanganan; d. Balai Teknik Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat melakukan; e. Sinkronisasi program kegiatan dalam rangka menjaga kehandalan Prasarana Perkeretaapian serta membuat rencana aksi untuk peningkatan presentase nilai TQI di masing-masing wilayahnya. e. Telah disampaikan Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian kepada Direktur Utama PT. KAI (Persero) Nomor:KA.008/1/24/K3/DJKA/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Permintaan Data Rencana Pengukuran dan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lintasan/Track Quality Index (TQI) Tahun 2025.
3.	IKK. Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal	a. Penyusunan target pengawasan tahun 2025; b. Pengawasan dan koordinasi dengan BTP terkait progres dan rencana waktu pekerjaan fasilitas operasi	a. Dilakukan penyusunan Rencana Aksi 2025 Bidang Fasilitas Operasi Kereta Api b. Dilakukan koordinasi dan pembaharuan database monitoring pekerjaan pembangunan fasilitas operasi kereta api



No	Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		c. Penyelesaian asistensi dokumen persinyalan permohonan perizinan pembangunan sistem persinyalan elektrik dan intermediate blok lintas Prabumulih-Simpang masih dilakukan perbaikan data dukung	c. Dilakukan asistensi dokumen gambar teknis pembangunan sistem persinyalan elektrik dan intermediate blok Lintas Prabumulih - Simpang yang termasuk dalam permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum wilayah segmen I Lintas Lahat - Kertapati
4.	IKK. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	a. Perlu diusulkan ke Setditjen Perkeretaapian untuk pembangunan/pengembangan aplikasi di Direktorat Prasarana Perkeretaapian; b. Perlu koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian untuk penerapan Single Sign On (SSO); c. Sosialisasi dan Launching Aplikasi Perzinan Perpotongan dan/atau persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain serta Aplikasi Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian; d. Evaluasi indikator kinerja kegiatan untuk periode Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode	a. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait penyelesaian sinkronisasi Single Sign On (SSO) untuk Aplikasi Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dan aplikasi Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian b. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait penyelesaian sinkronisasi <i>Single Sign On</i> (SSO) untuk Aplikasi Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dan aplikasi Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian c. Masih terdapat error pada berupa API (Application Programing Interface) terkait berbagi data disposisi dan TTE (Tanda Tangan Elektronik), saat ini masih dilakukan penanganan terkait error tersebut, maka sosialisasi belum bisa dilaksanakan pada Triwulan I.



No	Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		tahun 2025-2029; e. Aktif menyebarkan link survei kepuasan masyarakat unit kerja kepada pemohon/pengguna jasa unit kerja, menjaga komunikasi yang baik dengan pemohon, serta menjelaskan tentang tujuan dari pelaksanaan SKM; f. Penyelesaian permohonan perizinan yang masih berproses sampai akhir Desember tahun 2024.	d. Telah dilakukan evaluasi indikator kinerja dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029 e. Telah dilakukan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat periode triwulan I berdasarkan hasil analisis survei, dari Laporan SKM Periode Triwulan Ke-I Tahun 2025 periode bulan Januari – Maret 2025 f. penyelesaian proses perizinan bidang prasarana perkeretaapian periode triwulan I tahun 2025 (Januari s.d Maret 2025) sebanyak 13 Pelayanan bidang prasarana perkeretaapian yang telah selesai/diterbitkan terdiri dari : 1) Pelayanan Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain sebanyak 11 Penetapan 2) Pelayanan sertifikasi komponen prasarana perkeretaapian sebanyak 2 penetapan sertifikasi
5.	IKK. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	a. Perlu koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian untuk penerapan Single Sign On (SSO); b. Launching Aplikasi Perzinan Perpotongan dan/atau persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain serta Aplikasi Sertifikasi	a. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait penyelesaian sinkronisasi <i>Single Sign On</i> (SSO) untuk aplikasi Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian b. Masih terdapat error pada berupa API (Application Programing Interface) terkait berbagi data disposisi dan TTE (Tanda Tangan Elektronik), saat ini masih



No	Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Prasarana Perkeretaapian.	dilakukan penanganan terkait error tersebut, maka sosialisasi belum bisa dilaksanakan pada Triwulan I. Untuk Sosialisasi rencana akan dilakukan pada bulan Desember.
6.	IKK. Perentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	a. Penyelesaian NSPK pada tahun 2025 untuk NSPK yang masih berproses penyusunan di tahun 2024; b. Sesuai dengan penetapan proses bisnis dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian perlu dilakukan penyusunan SOP Makro dan SOP Mikro Direktorat Prasarana Perkeretaapian. c. Perlu dilakukan revisi anggaran untuk kebutuhan kajian NSPK	a. Telah ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : KP-DJKA 47 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana perkeretaapian Milik Negara pada Balai Teknik Perkeretaapian yang terdiri dari : 1) Standar Operasional Prosedur Inventarisasi dan Penilaian Berkala atas Kondisi Prasarana Perkeretaapian (Barang Milik Negara); 2) Standar Operasional Prosedur Penetapan Rencana Kinerja Perawatan dan Pengoperasian prasarana Perkeretaapian; 3) Standar Operasional Prosedur Kebutuhan Penganggaran Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian; 4) Standar Operasional Prosedur Penugasan Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian; 5) Standar Operasional Prosedur Verifikasi Laporan Penyelenggaraan



No	Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			dan Pencapaian Kinerja Perawatan dan Pengoperasian Prasarana perkeretaapian 6) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Laporan Penyelenggaraan dan Pencapaian Kinerja Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian oleh Tim Verifikasi 7) Standar Operasional Prosedur Pengawasan Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian b. Penyusunan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro dan Mikro bidang Prasarana Perkeretaapian telah selesai dilakukan pembahasan dan penyusunan c. Sesuai dengan Penetapan Revisi DIPA/POK ke 2 telah diusulkan penyusunan 2 kajian NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian
7.	IKK. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	a. Penyelesaian penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029; b. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian c. Evaluasi Cascading	a. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Rencana Startegis Direktorat Prasarana Perkeretaapian belum ada penetapan dikarenakan belum adanya penetapan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Rencana Startgeis Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode 2025-2029, final rencana strategis Direkrorat Prasarana Perkeretaapian menunggu penetapan Renstra level Es1



No	Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian; d. Pelaporan Tindaklanjut Rekomendasi Evaluasi Kinerja Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian; e. Bimbingan Teknis Manajemen Kinerja untuk pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian; f. Penerapan Inovasi untuk meningkatkan nilai AKIP ditahun 2025.	b. Telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 c. Telah dilaksanakan pembahasan penyusunan <i>cascading</i> Indikator Kinerja Berjenjang untuk Indikator Kinerja Individu (IKI) dari Level Eselon III sampai dengan Jabatan Fungsional Tertentu/Umum d. Telah melaksanakan semua rekomendasi dari Inspektorat Jenderal dan pelaporan melalui Nota Dinas Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : 0145/K3/II?2025 tanggal 28 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025 e. Untuk Bimbingan Teknis Manajemen Kinerja belum bisa dilaksanakan di triwulan I f. Telah dilaksanakan pembahasan secara berkala Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Bulanan dengan para penanggungjawab kinerja dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana kebijakan Direktur Prasarana Perkeretaapian melalui Nota Dinas : 0800/K3/I/2025 tanggal 29 Januari 2025. Penerapan inovasi kinerja dan budaya kinerja memberikan dampak positif
8.	IKK. Tingkat Maturitas SPIP	a. Penyesuaian Kebijakan adalah penyelesaian	a. Untuk Renstra Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029 telah



No	Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029 dan Evaluasi Indikator Tingkat SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian b. Penggunaan Aplikasi Mr. Bean (MR DJKA) untuk penyusunan piagam manajemen risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk memudahkan penyusunan; c. Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi berkala untuk kegiatan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian; d. Pelaksanaan bimbingan teknis/workshop/ diklat manajemen risiko untuk peningkatan pemahaman/kompetensi pegawai	dilakukan evaluasi Indikator Kinerja SPIP menjadi Tingkat Penerapan Manajemen Risiko b. Telah ditetapkan Piagam manajemen risiko dan penyusunan menggunakan aplikasi Mr Bean DJKA c. Telah dilaksanakan komunikasi dan konsultasi untuk penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2025, pada periode Triwulan II akan dilaksanakan Pemantauan Penanganan Risiko Periode Triwulan I d. Tidak dapat dilaksanakan bimbingan teknis Manajemen Risiko dikarenakan adanya pembatasan anggaran sesuai dengan Inpres 1 Tahun 2025
9.	IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat	a. Usulan Buka blokir/revisi anggaran TA 2025 b. Penyelesaian penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Direktorat	a. Telah diusulkan buka/bloir anggaran TA 2025 untuk kegiatan Jasa Konsultansi IMO b. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian belum ada penetapan



No	Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Prasarana Perkeretaapian	Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029 dan Evaluasi Indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran; c. Penetapan Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2025 d. Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran Tahun Anggaran 2025 e. Penyusun Rencana Aksi Tahun 2025 untuk penyerapan anggaran berdasarkan anggaran yang tidak diblokir f. Revisi Hal. III DIPA TA 2025	dikarenakan belum adanya penetapan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Rencana Startgeis Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode 2025-2029, final rencana strategis Direkrorat Prasarana Perkeretaapian menunggu penetapan Renstra level Es1 c. Penetapan struktur pengelola anggaran TA 2025 dengan penetapan Surat Keputusan Nomor : SK-SPPPPKA 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas/ Tanggung Jawab Pelaksana Pengelola Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Pada Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan Dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025 d. Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana ditetapkan dalam rencana aksi atas kinerja tahun 2025 e. Pada periode triwulan I telah dilakukan Revisi Hal. III DIPA TA 2025
10	IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	1. Penagihan kepada pemohon terkait dengan penetapan perizinan dibidang prasarana perkeretaapian; 2. Penyusunan perhitungan target PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	a. Dilakukan penagihan kepada pemohon terkait PNBP Pelayanan Penetapan Perizinan dan pelayanan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan sampai triwulan 1 (31 Maret 2025) untuk PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp. 1.616.721.448,00



No	Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Tahun 2025.; 3. Untuk inovasi pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian yaitu akan dilakukan penerapan sertifikasi berbasis teknologi pada Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2024 sehingga akan mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian.	b. Penyusuna Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana ditetapkan didalam rencana aksi atas kinerja atahun 2025 c. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait penyelesaian sinkronisasi Single Sign On (SSO) untuk Aplikasi Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dan aplikasi Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian dan Launching pada TW II.

*Data Dukung Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 bisa diakses melalui tautan <https://s.id/TLRekomendasiTWI2025>

III.2. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi serta analisis capaian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode triwulan I tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa :

- a.** Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2024 disusun sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.



85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- b.** Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :



Tabel III. 2

Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI TW I	PRESENTASE CAPAIAN TW I
Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana	%	64,540	61,430	61,430	100,000%
Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur Ka Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I Dan II	%	95,020	95,020	95,443	100,445%
	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	%	65,270	64,430	64,430	100,000%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,890	3,870	3,886	100,439%
Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,340	47,670	48.379	101,487%
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	90,480	86,900	87,057	100,000%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pmeriintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,200	-	-	-
	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	15,000	-	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,760	45,817	50,000	109,129%
	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,000	12,029	178,004	1.479,836%
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	79,000	-	-	-
Rata – Rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025						

*Data Dukung Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode Triwulan I Tahun 2025 dapat di lihat pada <https://s.id/DakungTWI2025>



- c.** Hasil Monitoring dan evaluasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja terdapat capaian kinerjanya di triwulan I Kinerja permasing-masing indikator sebagai berikut:
 - a)** Telah tercapai dengan baik atau *On the Right Track* sesuai dengan target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 10 indikator kinerja;
 - b)** Tidak terdapat 1 anomali data capaian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode triwulan I tahun 2025 yaitu Penerimaan PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
 - c)** Terdapat 3 indikator kinerja yang belum ditargetkan kinerjanya pada periode triwulan I, yaitu indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Nilai Pengawasan Kearsipan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
- d.** Monitoring dan Evaluasi kinerja internal dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara berkala dilaksanakan dan menjadi perhatian sangat penting dilaksanakan oleh seluruh pegawai dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan tujuan agar capaian kinerja dapat dimonitor secara berkala dan dapat mengidentifikasi kendala dan hambatan pelaksanaan kinerja serta dapat menyusun rencana pengendalian kendala/upaya peningkatan kinerja;
- e.** Pada triwulan I tahun 2025 telah terdapat perubahan budaya kinerja dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja yaitu diantaranya:
 - a)** Monitoring dan evaluasi bersama terhadap hasil laporan kegiatan pengukuran Track Quality Indeks (TQI) dengan Kereta Ukur per Periode IV Tahun 2024;
 - b)** dilaksanakan pembahasan secara berkala Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Bulanan dengan para penanggungjawab



kinerja dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana kebijakan Direktur Prasarana Perkeretaapian melalui Nota Dinas : 0800/K3/I/2025 tanggal 29 Januari 2025. Penerapan inovasi kinerja dan budaya kinerja memberikan dampak positif, hal ini dapat dibuktikan dengan dari hasil evaluasi kepatuhan pelaporan yang dilaksanakan oleh Setditjen Perkeretaapian, Direktorat Prasarana meraih urutan pertama tingkat kepatuhan unit kerja dalam pelaporan kinerja.

III.3. REKOMENDASI

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja sebagai acuan aktivitas pelaksanaan kinerja, adapun penyesuaian aktivitas dan anggaran guna peningkatan kinerja sebagai berikut:

IKK Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api Antar Wilayah

Rekomendasi:

- 1.** Akan dilakukan asistensi/pembahasan dokumen gambar design;
- 2.** Usulan Anggaran tahun 2026 dengan mempertimbangkan kelengkapan readiness kriteria (Feasibility Study (FS) dan Penetapan Trase)
- 3.** Akan dilakukan penyesuaian Rencana Penarikan Anggaran serta Revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025;
- 4.** Revisi Hal 3 DIPA/POK TA 2025.

IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I dan II

Rekomendasi:

- 1.** Akan dilakukan pembahasan penyusunan Pedoman Standar TQI pada bulan Mei 2025;
- 2.** Akan dilakukan koordinasi permintaan hasil pengukuran periode I Tahun 2025 dan direncanakan akan dilakukan evaluasi hasil pengukuran TQI;



- 3.** Evaluasi Perjanjian Kinerja serta rencana aksi atas perjanjian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025
- 4.** Evaluasi Rencana Penyerapan Anggaran a untuk monitoring dan evaluasi Pembangunan/peningkatan Jalur Kereta Api dan Bimbingan Teknis Bidang Jalur Kereta Api serta Pemeriksaan Jalan Rel dengan KA Ukur di Jawa, Sumatera dan Sulawesi serta penyesuaian rencana aksi tahun 2025.

IKK Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal

Rekomendasi:

- 1.** Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis bidang Fasop Kereta Api;
- 2.** Peningkatan Pemahaman SDM Bidang Prasarana Perkeretaapian; dan
- 3.** Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Perkeretaapian;

IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Rekomendasi:

- 1.** Akan dilakukan pengecekan/memastikan kembali token/API key tidak expired serta memeriksa resource data
- 2.** Akan dilakukan Launching Aplikasi Perzinan Perpotongan dan/atau persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain serta Aplikasi Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian;
- 3.** Aktif menyebarkan link survei kepuasan masyarakat unit kerja kepada pemohon/pengguna jasa unit kerja, menjaga komunikasi yang baik dengan pemohon, serta menjelaskan tentang tujuan dari pelaksanaan SKM; dan
- 4.** Penyelesaian permohonan perizinan yang masih berproses sampai akhir periode triwulan I tahun 2025

IKK Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Rekomendasi:



1. Akan dilakukan pengecekan/memastikan kembali token/API key tidak expired serta memeriksa resource data ;
2. Evaluasi Perjanjian Kinerja serta rencana aksi atas perjanjian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025;
3. Percepatan proses kontraktual Jasa Konsultansi Pengawasan IMO dan berkoordinasi dengan Balai terkait persiapan pelaksanaan IMO Tahun 2025;
4. penyesuaian Anggaran dengan melakukan penyesuaian rencana penyerapan anggaran pada kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Kelaikan prasarana Perkeretaapian dan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kelaikan Prasarana Perkeretaapian;

IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Rekomendasi:

1. Penyelesaian NSPK pada tahun 2025 untuk NSPK yang masih berproses penyusunan di tahun 2024;
2. Akan dilakukan penetapan proses bisnis dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian perlu dilakukan penyusunan SOP Makro dan SOP Mikro Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
3. Evaluasi Perjanjian Kinerja serta rencana aksi atas perjanjian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025;
4. penyesuaian Anggaran dengan melakukan penyesuaian rencana penyerapan anggaran pada kegiatan pendukung Indikator Kinerja.

IKK Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Rekomendasi:

1. Melakukan evaluasi rencana penyerapan anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian TA 2025 sesuai dengan penetapan Efisiensi TA 2025.
2. Koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian dan Penyelesaian penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029;



- 3.** Akan dilakukan persiapan evaluasi AKIP Tahun 2025
- 4.** Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025
- 5.** Sosialisasi Penerapan SOP Bidang SAKIP di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Rekomendasi:

- 1.** Evaluasi Perjanjian kinerja serta Penyusun penyesuaian Rencana Aksi Tahun 2025 untuk penyerapan anggaran berdasarkan anggaran yang tidak diblokir; dan;
- 2.** Revisi Hal. III DIPA TA 2025;
- 3.** Pengisian komponen Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Aplikasi SAKTI .

IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Rekomendasi:

- 1.** Usulan buka blokir/Pelepasan AA pada beberapa kegiatan yang di blokir Automatic Adjustment;
- 2.** Perlu dilakukan revisi DIPA/POK Halaman III DIPA secara berkala TA 2024;
- 3.** Evaluasi dan Penyesuaian target kinerja dan revisi rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun 2025;
- 4.** Evaluasi Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala TA 2025;
- 5.** Pengisian CRO pada aplikasi SAKTI secara berkala dan tepat waktu serta Koordinasi dalam rangka penilaian IKPA dengan KPPN;
- 6.** Percepatan pelaksanaan pekerjaan TA 2025.

IKK Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Prasarana Perkeretaapian

Rekomendasi:



1. Penagihan kepada pemohon terkait dengan penetapan perizinan dibidang prasarana perkeretaapian;
2. Evaluasi Perhitungan target PNBPN Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025 serta evaluasi rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025; dan;
3. Untuk inovasi pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian yaitu akan dilakukan penerapan sertifikasi berbasis teknologi pada Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2024 sehingga akan mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian.

IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Rekomendasi:

1. Penagihan kepada pemohon terkait dengan penetapan perizinan dibidang prasarana perkeretaapian;
2. Untuk Perubahan Budaya Kinerja akan dilakukan Penyesuaian penggunaan aplikasi SRIKANDI dan pembahasan tata cara pemberkasan arsip pada aplikasi SRIKANDI;
3. Akan dilaksanakan lanjutan Penataan Arsip LRT Jabodebek Tahap III dan pemindahan Arsip LRT Jabodebek Tahap Ke IV ;
4. Akan dilakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Kearsipan yang akan dilaksanakan secara online dengan materi penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.